

**KEEFEKTIFAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT BANK DALAM PENGAMANAN PIHAK
KREDITUR PADA PT. BANK BNI'46 Tbk
CABANG UNDIP SEMARANG**



**Tesis
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan

oleh :

**FAUZIAH HANUM, SH
B4B.001.121**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

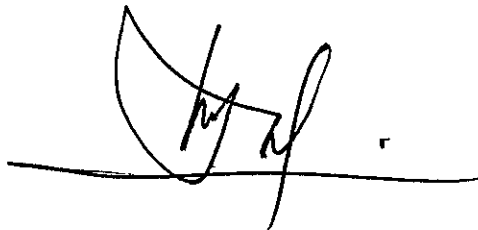
**KEEFEKTIFAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN
KREDIT BANK DALAM PENGAMANAN PIHAK
KREDITUR PADA PT. BANK BNI'46 Tbk
CABANG UNDIP SEMARANG**

oleh :

FAUZIAH HANUM, SH
NIM. B4B. 001. 121

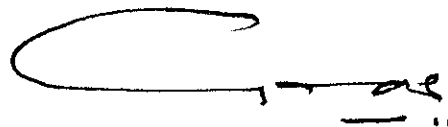
Telah di Pertahankan di Hadapan Tim Penguji
Pada tanggal : 19 Desember 2003

Pembimbing Utama

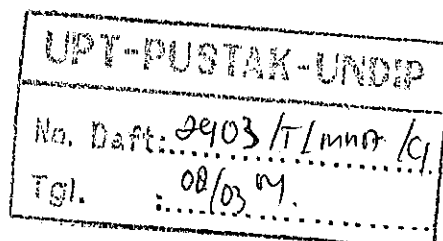


ACHMAD BUSRO, SH, M.Hum
Nip. 130.606.004

**Mengetahui
Ketua Program
Magister Notariat**



Prof. IGN. SUGANGGA, SH
Nip. 130.359.063



Motto :

- ***SELAKU HAKIN APA YANG DI
CITA-CITAKAN AKAN BERHASIL***
- ***TIADA HARI TANPA MEMBACA, KARENA ILMU
ADALAH CAHAYA SEBAGAI PENERANG
DALAM KEHIDUPAN***

TESIS ini kupersembahkan kepada :

- ❖ Kedua Orang Tua Penulis
- ❖ Calon Mertua Penulis
- ❖ Saudara-saudara Penulis
- ❖ Calon Suami Penulis
- ❖ Nusa Dan Bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta membantu baik secara moril maupun materiil sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir Eko Budiharjo, MSc, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
3. Bapak Suharto, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
4. Bapak Achmad Busro, SH, M.Hum selaku pembimbing tesis yang di sela-sela kesibukan beliau telah menyempatkan diri untuk berdiskusi dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak RMJ Koesmargono, SH, M.Hum selaku dosen wali yang telah memberikan dorongan semangat selama penulis kuliah di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
6. Para guru besar, dosen dan karyawan/karyawati Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang yang berkat jasa-

jasa beliau pengetahuan penulis khususnya di bidang hukum dan kenotariatan menjadi bertambah.

7. Kedua orang tua, Mertua dan Saudara-saudara penulis yang telah memberikan doa restunya serta dorongan moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
8. Bapak Taufik, SE dan Ibu Lisa, SE dan beserta staff kantor Bank BNI'46 Cabang Undip Semarang.
9. Dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Dan *Special thanks to ABDI Syaifulloh, SH, M.Kn* baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang maha sempurna atas segala sesuatu, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan guna menyusun dan mengembangkan penulisan tesis ini.

Semarang, Desember 2003

Penulis

ABSTRAKSI

Sebagaimana di ketahui bahwa usaha pokok bank adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan sumber utama pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit.

Kredit-kredit yang di berikan oleh bank perlu di amankan. Tanpa adanya pengamanan maka bank sulit untuk mengelakkan resiko yang datang, sebagai akibat tidak berprestasinya nasabah.

Oleh karena itu Bank BNI'46 dalam usahanya memberikan kredit kepada calon nasabah harus di dahului dengan perjanjian kredit terlebih dahulu, posisi perjanjian kredit itu cukup sistematis karena perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau perjanjian standart, alat pedoman mengenai batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pemberi kredit atau kreditur/bank maupun penerima kredit atau debitur/nasabah serta memiliki akibat dan resiko yang harus di derita oleh masing-masing pihak.

Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari kreditnya Bank BNI'46 melakukan tindakan yaitu adanya jaminan dalam pemberian kredit, di samping itu harus memperhatikan hal-hal sebagai beriku yaitu keadaan Bank dan keadaan calon nasabah selain itu juga berpedoman 5 C of Credit.

Metode penulisan ini menggunakan penelitian Yuridis-Empiris dan bersifat Deduktif analitis yaitu hasil yang di peroleh dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang Keefektifan Perjanjian Kredit Bank Dalam Pengamanan Kepada Kreditur Pada PT. Bank BNI'46 Tbk Cabang Undip Semarang yang kemudian di analisa sehingga dapat di ambil kesimpulan secara umum. Lokasi penelitian yaitu di Bank BNI'46 Cabang Undip Semarang.

Hasil dari penelitian itu menunjukan bahwa perjanjian kredit merupakan batasan hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur. Sedangkan langkah-langkah yang di lakukan Bank BNI'46 untuk mengamankan kredit pada dasarnya dapat di golongankan dua macam yaitu keadaan intern bank maupun keadaan calon nasabah.

ABSTRACT

As in knowing Business, bank Fundamentally o give services and credit in payment traffic and circulation of money. While especial source, earnings of bank is to come from credit interest

Credits which in giving by bank need in protecting. Without existence of security hence bank difficult to parry risk, incoming, as effect do not client it.

Because of, that Bank of BNI'46 in its effort give credit to (Customer, . have to in preceding with perjanjian of credit beforehand, position agreement of that systematic credit enough because agreement of credit as agreement of fundamental or agreement of standart, guidance appliance concerning rights and obligations definition of is each good side of giver of creditor or credit / receiver and also bank, debtor or credit / client and also, owning risk and effect which must in distress by each side.

To get and certainty of safety its credit of Bank of BNI'46 conduct action that is existence of guarantee in gift of credit, desptefully have to pay attention things as giving my that is situation of Bank and situation of client candidate besides also orientation 5 C Credit of.

Method, this writing use research of juridical - empirical and have the character of descriptive analyst that is result of which in obtaining from this research in expecting can give picture by totally and systematic about Effectiveness of Agreement Credit Bank In Security To Creditor At PT. Bank of BNI'46 Tbk Branch Undip Semarang which then in analyst so that earn in taking conclusion in general. Research location that is in Bank of BNI'46 Branch Undip Semarang.

Result of from that research indicate that agreement of credit represent rights and obligations definition to debtor and creditor. While steps which in doing Bank of BNI'46 to protect credit basically earn in classifying two kinds of that is situation of bank intern and also situation of client candidate.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : FAUZIAH HANUM, SH

Nim : B4B.001.121

Program Studi : Magister Kenotariatan UNDIP Semarang

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “ **Keefektifan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Pengamanan Pihak Kreditur Pada PT. Bank BNI’46 Tbk Cabang Undip Semarang**” merupakan karya asli saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, Desember 2003

Fauziah Hanum, SH
B4B.001.121

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------|-----|
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | i |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| ABSTRAKSI..... | iv |
| ABSTRAC..... | v |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |

BAB I. PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 11 |

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Perjanjian, Asas, Dan Syarat Sahnya Perjanjian..... | 13 |
| A.1. Pengertian Perjanjian..... | 13 |
| A.2. Asas-Asas Perjanjian..... | 17 |
| A.3. Syarat Sahnya Perjanjian..... | 18 |
| B. Bank Sebagai Penyalur Kredit..... | 20 |
| B.1. Pengertian Bank..... | 20 |

| | |
|---|----|
| B.2. Jenis Dan Fungsi Bank..... | 20 |
| C. Pengertian, Fungsi, Tujuan Dan Penilaian Kredit..... | 22 |
| C.1. Pengertian Kredit..... | 22 |
| A. Fungsi Kredit..... | 24 |
| B. Tujuan Kredit..... | 25 |
| C. Penilaian Kredit..... | 26 |
| C.2. Perjanjian Kredit..... | 29 |
| A. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku..... | 29 |
| B. Perjanjian Kredit Dan Upaya Pengamanannya..... | 31 |
| C. Mekanisme Perlindungan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit..... | 35 |
| D. Tinjauan Umum Perjanjian Baku..... | 37 |
| D.1. Perjanjian Baku..... | 37 |
| D.2. Jenis-Jenis Perjanjian Baku..... | 38 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | |
| A. Metode Pendekatan..... | 41 |
| B. Spesifik Penelitian..... | 41 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 41 |
| D. Penetapan Populasi Dan Sampling..... | 42 |
| E. Jenis Dan Sumber Data..... | 43 |
| F. Metode Penyajian Data..... | 44 |
| G. Analisa Data..... | 45 |

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. HASIL PENELITIAN..... | 47 |
| A.1. Gambaran Umum Bank Negara Indonesia'46..... | 47 |
| A.1.1. Sejarah Berdirinya BNI'46..... | 47 |
| A.1.2. Kegiatan Usaha BNI'46..... | 48 |
| A.1.3. Aturan-Aturan Dasar Yang Harus Di Perhatikan Agar Klausula Dalam Perjanjian Kredit Mengikat Debitur..... | 58 |
| A.1.4. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit..... | 61 |
| A.2. Beberapa Permasalahan Hukum Perjanjian Kredit Bank..... | 67 |
| A.2.1. Klausula-klausula Dalam Perjanjian Kredit Yang Memberatkan Nasabah Debitur..... | 67 |
| A.2.2. Beberapa Permasalahan Hukum Dari Perjanjian Kredit Yang Merugikan Kedudukan Bank..... | 71 |
| B. PEMBAHASAN..... | 73 |
| B.1. Keefektifan Perjanjian Kredit Bank Sebagai Upaya Pengamanan Kredit Yang Di Salurkan Pihak Bank..... | 73 |
| B.2. Upaya-upaya Yang Dilakukan Bank Negara Indonesia Dalam Rangka Melakukan Pengamanan Kredit..... | 80 |

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 90 |
| B. Saran..... | 91 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini dan di masa yang akan datang selalu diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup kecerdasan seluruh rakyat Indonesia, untuk mewujudkan hal tersebut maka pemerintah harus dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di negara ini, baik sumber daya yang dapat di perbaharui maupun yang tidak dapat di perbaharui yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka pembangunan dibidang ekonomi maka perlu diberikan perhatian kepada usaha untuk membina dan melindungi pengusaha kecil serta pengusaha menengah yang melakukan usahanya secara tradisional, untuk arah pembangunan ekonomi tersebut maka lembaga keuangan baik Bank maupun bukan Bank hendaknya lebih meningkatkan fungsi dan peranannya agar lebih aktif dalam pembangunan terutama dalam penyediaan dana.

Penyediaan dana oleh bank di tekankan pada perusahaan kecil maupun menengah yang memerlukan dana tambahan untuk beroperasi dan sumber dana tersebut antara lain di harapkan dari kredit bank. Sebagaimana di ketahui bahwa usaha pokok bank adalah memberikan kredit dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan sumber utama pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ,
Pasal 1 ayat (11) Kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Pencantuman kata persetujuan atau perjanjian pinjam-meminjam di dalam definisi atau pengertian kredit sebagaimana yang dimaksudkan di atas dapat mempunyai beberapa maksud sebagai berikut :

- (1) Bahwa pembentuk Undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa hubungan kredit Bank adalah hubungan kontraktual antara Bank dan Nasabah Debitur yang berbentuk pinjam-meminjam. Dengan demikian hubungan kredit Bank berlaku Buku Ketiga (Tentang Perikatan) pada umumnya dan Bab Ketiga Belas (Tentang Perjanjian pinjam-meminjam) KUH Perdata khususnya.
- (2) Maksud yang lain dari pembentuk undang-undang yang dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 1 Ayat (11) Undang-undang Perbankan 1998 itu ialah bahwa pembentuk undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit Bank dibuat berdasarkan perjanjian tertulis.¹⁾

Sebuah Bank menyetujui permohonan calon nasabah debitur untuk mendapatkan fasilitas kredit, petugas Bank akan menganalisa calon nasabah

¹⁾ Sutan Remi Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Pelindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta 1993, hal. 180.

debitur untuk menentukan kemampuan dan kemauan calon nasabah debitur tersebut untuk membayar kembali fasilitas kredit yang akan dinikmatinya.

Menurut Roger H. Hale yang dikutip oleh Sutan Remy Syahdeini bahwa bank dewasa ini akan berbuat sebaik-baiknya untuk tidak bertumpu pada perasaan emosionalnya, seperti harapan dan khawatiran, tetapi bertumpu kepada pendapat-pendapat yang di dasarkan kepada studi yang mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan calon nasabah debitur. Menurut Sutan Remy Syahdeini ada dua fundamental dari analisis kredit modern yaitu :

1. Penelitian terhadap sifat bisnis nasabah debitur dalam kaitannya dengan sektor industri yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui The comparitif market position dari perusahaan nasabah debitur, tekanan yang ada dari persaingan, struktur resiko dan imbalan yang dapat di harapkan dari sektor industri yang bersangkutan.
2. Analisa Terhadap cash Flow Perusahaan

Hal ini bertujuan untuk mengetahui gerakan-gerakan uang tunai perusahaan di lihat dari segi sumber dan segi penggunaannya berdasarkan data keuangan perusahaan yang lalu.²⁾

Secara analisis Bank terhadap calon nasabah debitur di lakukan terhadap aspek-aspek yang dikenal dalam dunia Perbankan sebagai The Five C'S of credit analisis yaitu :

- character
- capacity

²⁾ Sutan Remi Syahdeini, Ibid. hal 176.

- capital
- collateral
- condition.³⁾

Dilihat uraian di atas, maka karakter menyangkut penilaian mengenai kemauan nasabah debitur untuk membayar kembali kreditnya, sedangkan capacity dan capital menyangkut kemampuan nasabah debitur untuk membayar kembali kreditnya. Yang dimaksud dengan collateral adalah agunan atau jaminan berupa benda atau orang, yang dapat di berikan oleh calon debitur. Sedangkan condition adalah keadaan ekonomi pada umumnya, baik ekonomi nasional maupun ekonomi Internasional dan keadaan ekonomi calon debitur.

Di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 1998 menentukan sebagai berikut :

“Dalam pemberian atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang di perjanjikan.

Apabila dari hasil analisisnya Bank menyetujui permohonan fasilitas kredit itu, maka pemberian fasilitas kredit itu di tuangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara Bank dan pemohon kredit yang dinamakan perjanjian kredit bank atau biasa di singkat dengan perjanjian kredit.

³⁾ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1997, hal. 36.

Dalam praktek Perbankan, guna mengamankan pemberian kredit atau pembiayaan, umumnya perjanjian kredit di tuangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku (Standars contract). Hal ini di dasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Instruksi Presidium Nomor 15/IN/10/66 tentang pedoman kebijakan dibidang perkreditan tanggal 3 oktober 1966 Junto Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pemb tanggal 8 Oktober 1966, Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor/649/UPK/Pemb tanggal 20 oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet No.10/EK/2/1967 tanggal 6 Februari 1967, yang menyatakan bank di larang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabah atau bank sentral dan bank-bank lainnya. Dari sini jelaslah bahwa dalam memberikan kredit dalam berbagai bentuk wajib dibuatkan perjanjian atau akad kreditnya.
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 27/7/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1965 tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kewajiban perkreditan bank bagi bank umum, yang menyatakan bahwa setiap kredit yang telah di setuju dan di sepakati pemohon kredit di tuangkan dalam perjanjian kredit (Akad kredit) secara tertulis.⁴⁾

⁴⁾ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001, hal. 264.

Perjanjian kredit dengan meninjau aturan dalam (KUH Perdata) adalah salah satu dari bentuk perjanjian yang di kelompokkan dalam perjanjian pinjam meminjam sebagaimana di atur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 BW (KUH Perdata). Sehingga landasan aturan yang di pergunakan dalam membuat perjanjian kredit tentunya tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan yang ada dalam BW (KUH Perdata) tersebut.⁵⁾

Posisi perjanjian kredit ini di pandang cukup strategis, hal ini di sebabkan karena perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri.

Menurut Ch Gatot Wardaya yang dikutip oleh Rachmadi Usman, bahwa perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, di antaranya :

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikatnya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan kewajiban di antara debitur dan kreditur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.⁶⁾

Kemudian kalau di lihat dari bentuk prestasinya, maka perjanjian kredit adalah perjanjian yang prestasinya adalah memberikan sesuatu Pasal 1234 KUH Perdata.⁷⁾

⁵⁾ Ignatius Ridwan Widyadharma, op. cit, hal. 2.

⁶⁾ Rachmadi Usman, op. cit, hal. 265.

Sehingga apabila para pihak dalam perjanjian kredit ini tidak memenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak berhak menuntut pemenuhan prestasi baik di sertai atau tanpa ganti rugi, pembubaran baik di sertai atau tanpa ganti rugi atau ganti rugi saja.⁸⁾

Bank Negara Indonesia sebagai Bank Konvensional di dalam memberikan kredit selalu berpegang pada aspek-aspek "The Five C'S of Credit, di samping itu ketentuan yang ada dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 yaitu Pasal 8 ayat (1). Kredit yang di berikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank Negara Indonesia selalu memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Oleh karena itu di dalam pemberian kredit Bank Negara Indonesia selalu memasukkan klausula-klausula dalam perjanjian. Salah satunya Pasal 4 BNI'46 ditentukan bahwa :

- Kredit diberikan dalam jangka waktu paling lama sampai tanggal di tentukan di dalam perjanjian.
- Bank hanya terikat dan berkewajiban untuk menyediakan kredit dan penerima hanya berhak mempergunakan kredit yang di peroleh paling lama sampai dengan tanggal yang di tentukan pada ayat (1).⁹⁾
- Dari ketentuan di atas dapat simpulkan bahwa dalam perjanjian kredit Bank memiliki kewajiban pokok yaitu menyediakan kredit sesuai dengan tujuan kredit dan jangka waktu perjanjian.

⁷⁾ Ari Purwadi, *Perjanjian Bank Sebagai Upaya Mengamankan Kredit Bank*, Hukum dan Pembangunan Nomor XXV Februari 1995, hal. 57.

⁸⁾ Ari Purwadi, *Ibid*, hal 38.

⁹⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung 1978, hal. 75.

Kewajiban ini tidak bersifat mutlak, maka bank berhak menyimpangi dalam hal penerima kredit tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian itu. Di dalam Pasal 28 perjanjian kredit Bank BNI'46 Model PK I di sebutkan sebagai berikut :

“Bank berhak secara sepihak dan sewaktu-waktu tanpa terlebih dahulu memberitahukan atau menegur penerima kredit, dan mengakhiri jangka waktu kredit ini apabila :

- Penerima kredit tidak atau belum mempergunakan kredit ini setelah lewat tiga bulan sejak berlakunya perjanjian ini.
- Bunga tidak di bayar pada waktu yang telah di tentukan.
- Pengurus perusahaan meninggal dunia, perusahaan pailit sehingga timbul sengketa mengenai kepemilikan perusahaan.
- Penerima kredit memberikan data yang tidak benar sehubungan dengan perjanjian ini.

Perjanjian kredit yang dibuat dalam klausula-klausula di harapkan dapat memberikan keamanan bagi pihak Bank dalam pemberian kredit. Hal ini penting sebab pada waktu kredit akan diberikan pada umumnya posisi bank lebih kuat dari calon nasabah debitur. Demikian pula pada saat perjanjian akan ditanda tangani dan terjadi tawar-menawar maka posisi bank lebih kuat.

Keamanan bagi bank perlu karena dana yang di simpan pada sbank perlu dilindungi sebab apabila bank tidak memperhatikan keamanan dana masyarakat tersebut maka akan menyulitkan pihak bank sendiri yaitu akan mengurangi kepercayaan masyarakat dalam menanamkan dananya pada pihak bank.

Langkah yang perlu di ambil oleh bank dalam hal mengamankan kredit yang di salurkan pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi dua hal yaitu : pengamanan preventif dan pengamanan represif.

Pengamanan preventif adalah pengamanan yang di lakukan oleh pihak bank dalam timbulnya kemacetan kredit, sedangkan pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan dalam hal untuk menyelesaikan kredit yang telah mengalami ketidaklancaran atau macet.

Dalam rangka pengamanan resiko kredit, perlu di perhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyerahan kredit yang baik dari jumlah kredit yang di berikan sehingga tidak terjadi konsentrasi pemberian kredit kepada sejumlah kecil debitur.
2. Penetapan asuransi atas barang jaminan
3. Memanfaatkan lembaga asuransi kredit, yaitu dengan jalan mengasuransikan kredit yang diberikan.¹⁰⁾

Dengan demikian pengamanan kredit pada hakekatnya memperkecil resiko, bahkan sampai pada menghilangkan resiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul atau terjadi. Di dalam pengamanan kredit yang di lakukan dengan perjanjian kredit dengan memasukkan klausula-klausula di dalam perjanjian kredit bank seyogyanya harus tidak berat sebelah. Perjanjian kredit tidak boleh hanya melindungi kepentingan bank saja atau kepentingan nasabah debitur.

Pengamatan penulis terhadap perjanjian kredit yang diambil sebagai sampel maka terdapat permasalahan hukum di sekitar perjanjian kredit. Permasalahan itu

¹⁰⁾ WidjaSnarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta 1997, hal. 70.

menyangkut berbagai hal mulai dari bentuk perjanjian kredit yang di buat sebagai perjanjian baku, dimuat kalusula-klausula yang merugikan nasabah debitur, dimuatnya klausula-klausula yang merugikan bank.

Dari hal inilah yang melatar belakangi peneliti menyusun tesis dengan judul

**KEEFEKTIFAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
DALAM PENGAMANAN PIHAK KREDITUR PADA PT. BANK BNI'46
Tbk CABANG UNDIP SEMARANG**

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan suatu karya ilmiah agar karya tersebut dapat tersusun secara sistematis dan terfokus, maka berdasarkan latar belakang penulisan dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian kredit dapat dipergunakan sebagai upaya pengamanan kredit yang disalurkan pihak bank.
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh PT. Bank BNI'46 Tbk Cabang Undip Semarang dalam rangka melakukan pengamanan kredit.

C. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh gambaran sejauhmana perjanjian kredit dapat dipergunakan sebagai upaya pengamanan kredit.
2. Memperoleh penjelasan tentang upaya-upaya pengamanan kredit yang tepat bagi Bank Negara Indonesia (BNI).

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah pastilah diharapkan akan suatu manfaat dari penelitian tersebut yaitu :

1. Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan dalam mengambil keputusan atau membuat kebijakan yang berkaitan dengan perjanjian kredit.
- b. Bermanfaat bagi pengelola Bank Negara Indonesia dalam pelaksanaan perjanjian kredit, sehingga pihak bank lebih berhati-hati lagi dalam pemberian kredit.
- c. Bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai aspek juridis dalam perjanjian kredit.

2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek yuridis perjanjian kredit.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu :

Bab I : Berisi Tentang PENDAHULUAN berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- Bab II : Berisi Tentang TINJAUAN PUSTAKA Berisi Pengertian, Asas, dan syarat sahnya perjanjian Berupa Perjanjian Secara Umum, Asas-Asas Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Macam-Macam Perjanjian, Bank Sebagai Lembaga Penyalur Kredit Berupa Pengertian Bank, Jenis Dan Fungsi Bank, Pengertian Perjanjian Kredit Berupa Pengertian Kredit, Tujuan Kredit, Penilai Kredit, Perjanjian Kredit Berupa Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku, Perjanjian Kredit Dan Upaya Pengamanannya, Perlindungan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit, Tinjauan Perjanjian Baku Berupa Pengertian Perjanjian Baku, Macam-Macam Perjanjian Baku.
- Bab III : Berisi Tentang Metode Penelitian yang terdiri dari Metode Pendekatan, Spesifik Penelitian, Lokasi Penelitian, Penetapan Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Metode Penyajian Data, dan Analisa Data.
- Bab VI : Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan dari Bagaimana Perjanjian Kredit Dapat Di Pergunakan Sebagai Upaya Pengamanan Kredit Yang Disalurkan Pihak Bank, Dan Upaya Yang Dilakukan Oleh PT. Bank BNI 46 Tbk Cabang Undip Semarang Dalam Rangka Melakukan Pengamanan Kredit.
- Bab V : Berisi Tentang Kesimpulan Dan Saran Dari Hasil Penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERJANJIAN, ASAS, DAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

A.1. Pengertian Perjanjian

Ketentuan yang mengatur perjanjian terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III dengan judul “Tentang Perikatan”.

Kata “Perikatan” (*verbinten*) ini mempunyai arti yang lebih luas daripada perkataan “Perjanjian” (*overeenkomst*), sebab perikatan dapat timbul karena :¹¹⁾

a. Perjanjian (kontrak)

Misalnya adalah perjanjian Jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian kredit, perjanjian perburuhan, perjanjian pemberian kuasa.

b. Bukan dari Perjanjian (dari Undang-Undang).

Dalam perikatan ini sebelumnya tidak ada persetujuan dan terjadi antara lain karena :

1) Perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang dimaksud oleh Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

2) Pengurusan kepentingan orang lain (*zaakwarneming*) atau perwakilan

¹¹⁾ Kansil dan Christine Kansil, *Modul Hukum Perdata (termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2000, hal.209

sukarela atau mewakili kepentingan orang lain tanpa diminta atau disuruh oleh orang lain, seperti yang dimaksud oleh Pasal 1354 KUH Perdata yang berbunyi :

“ Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sehingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.”

Pengertian mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

Menurut para sarjana rumusan Pasal 1313 KUH Perdata memiliki banyak kelemahan. Abdulkadir Muhammad menyatakan kelemahan Pasal 1313 KUH Perdata adalah sebagai berikut :¹²⁾

a. Hanya menyangkut sepihak saja

Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Kata “mengikatkan diri” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya dirumuskan “saling mengikatkan diri”. Jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

¹²⁾ Abdulkasir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal.78

b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa konsensus

pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara kreditur dan debitur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

d. Tanpa menyebut tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata di atas, maka menurut Abdulkadir Muhammad merumuskan definisi perjanjian yaitu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹³⁾

Sedangkan beberapa pakar hukum memberikan definisi yang berbeda-beda namun intinya tetap sama seperti yang tertulis dalam Pasal 1313 KUH Perdata, antara lain :

¹³⁾ Ibid, hal 79

1. Prof. R. Subekti

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁴⁾

2. Prof. Dr. R.M.Sudikno Mertokusumo, SH

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁵⁾

3. K.R.M.T. Tirtodiningrat, SH

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.¹⁶⁾

4. Prof. R. Wijono Prodjodikoro, SH

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁷⁾

5. Rutten

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang yang ditujukan

¹⁴⁾ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hal 1

¹⁵⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 96

¹⁶⁾ Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1966, hal.83

¹⁷⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Pokok-pokok hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hal 11

untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik.¹⁸⁾

6. Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari pengertian ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.¹⁹⁾

7. M. Yahya Harahap, SH

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁰⁾

A.2 Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas hukum yang berkaitan dengan lahirnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, asas-asas tersebut adalah

1. Asas konsensualisme, artinya perjanjian itu selesai karena persesuaian kehendak atau konsensus semata-mata.

¹⁸⁾ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata I (Perikatan yang lahir dari Perjanjian)*, FH-UNDIP, Semarang, 1996, hal. 49

¹⁹⁾ Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, *Aneka Hukum Bisnis*, hal. 6

²⁰⁾ M. Yahya Harahap, SH, *Segi-segi hukum Perjanjian*, hal. 6

2. Asas kekuatan mengikat dari perjanjian, artinya pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.
3. Asas kebebasan berkontrak, artinya orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya, dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak, dan bebas memilih Undang-Undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian itu.
4. Asas itikad baik, artinya dalam pelaksanaannya perjanjian itu harus berdasarkan keadilan dan kepatutan.

A.3. Syarat-syarat sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila dipenuhi 4 syarat seperti yang ditegaskan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (Kesepakatan).

Kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri ini terjadi secara bebas atau dengan kebebasan.

“Adanya kebebasan bersepakat (konsensual) para subyek hukum atau orang, dapat terjadi dengan :

- a. Secara tegas, baik dengan mengucapkan kata atau tertulis.
- b. Secara diam, baik dengan suatu sikap atau dengan syarat²¹⁾

²¹⁾ Kansil dan Christine Kansil, Op.cit, hal. 224

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Cakap Hukum).

Seorang dikatakan cakap hukum apabila seseorang, laki-laki atau perempuan telah berumur 21 tahun, atau bagi seorang perempuan apabila

3. Suatu hal tertentu (Hal Tertentu).

Ketentuan mengenai hal tertentu ini menyangkut obyek hukum atau mengenai bendanya.

“ Dalam membuat perjanjian antara para subyek hukum itu mengenai obyeknya, apakah menyangkut benda berujud, tidak berujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak.”²²⁾

4. Suatu sebab yang halal (Sebab Yang Halal).

“Dalam pengertian ini pada benda (obyek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat”.²³⁾

Syarat suatu sebab yang halal ini mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Perjanjian harus mempunyai sebab
2. Sebabnya harus halal

Syarat no.1 dan 2 disebut syarat subyektif, yaitu syarat untuk subyek hukum (orangnya). Sedangkan syarat no.3 dan 4 disebut syarat obyektif, yaitu syarat untuk obyek hukum (bendanya).

²²⁾ ibid, hal 227

²³⁾ op.cit, hal 221

B. BANK SEBAGAI LEMBAGA PENYALUR KREDIT

B.1. Pengertian Bank

Salah satu lembaga keuangan yang terpenting dalam masyarakat adalah bank. Perkataan bank dalam kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan hal yang asing lagi, bank tidak hanya menjadi sahabat masyarakat perkotaan, tetapi pada saat ini juga menjadi sahabat masyarakat pedesaan.

Menurut Macleod dalam buku "The Theory and Practice of Banking" bankir adalah seorang pengusaha yang membeli uang dan pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman lainnya.²⁴⁾

Pengertian bank yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Dari pengertian di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa hukum perbankan pada dasarnya merupakan serangkaian kaidah yang mengatur tentang badan usaha perbankan baik yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktek perbankan.

B.2. Jenis dan Fungsi Bank

Berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi :

1. Bank Sentral

Yaitu lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan

²⁴⁾ Bambang Suggono, *ibid*, hal : 130

melaksanakan kegiatan moneter, mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan.

2. Bank Umum

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 8 Undang-Undang No. 10 /1998).

3. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Hal tersebut dimungkinkan dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Perbankan 1998 dengan mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan mengembangkan perumahan.²⁵⁾

Sedangkan menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Bank berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua (2) :

1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

²⁵⁾ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1993, hal 49

2. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sementara itu ditinjau secara umum bank dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi :

- a. Sebagai pencipta uang

Terutama dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

- b. Sebagai penampung uang masyarakat

Sebagai penampung uang masyarakat, bank melakukan operasi kredit artinya bank menerima dana dari pihak luar terutama dari masyarakat.

- c. Sebagai penyalur uang ke masyarakat

Dalam hal ini bank melaksanakan operasi perkreditan aktif. Modal yang berasal dari simpanan masyarakat dan atau pihak lainnya disalurkan oleh bank kepada pihak-pihak yang membutuhkan berupa pemberian kredit.

C. PENGERTIAN, FUNGSI DAN TUJUAN KREDIT

C.1. Pengertian Kredit

Dari berbagai literature dapat diketahui bahwa kredit sudah muncul dan dibutuhkan sejak jaman dahulu kala, baik oleh perorangan, badan-badan usaha, dan bahkan negara. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam menaikkan taraf hidupnya seringkali terhambat oleh karena keterbatasan modal. Modal ini dapat diperoleh antara lain dengan melalui sarana kredit.

Sebenarnya kata “Kredit” itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Credit” yang intinya kepercayaan. Kredit tanpa kepercayaan tidak bisa terjadi. Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan. Dalam dunia perdagangan kepercayaan dapat diberikan atau diterima dalam bentuk uang, barang dan jasa.

Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa intisari dari arti kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang luas yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, sebagaimana bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.²⁶⁾

Di dalam pengertian suatu kredit terkandung dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek yuridis. Aspek ekonomis adalah adanya pembayaran bunga oleh yang menerima pinjaman sebagai imbalan yang diterima kreditur sebagai keuntungan. Sedangkan aspek yuridisnya adalah adanya dua pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.²⁷⁾

²⁶⁾ Tjipto, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal 14

²⁷⁾ Mahmoedin, *Aspek Kredit Bank*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal 7

Sedangkan unsur-unsur yang harus diperhatikan didalam pemberian suatu kredit adalah :

1. Unsur kepercayaan, yaitu suatu keyakinan dan kepercayaan bahwa kelebihan dana/uang/barang/jasa yang akan diberikannya akan kembali dan menghasilkan keuntungan.
2. Unsur prestasi yaitu pihak pemberi kredit mau memberikan prestasi dalam bentuk dana/uang/barang/jasa apabila mempunyai keyakinan bahwa prestasi itu akan dapat diperolehnya kembali.
3. Unsur waktu, yaitu keyakinan bahwa pemberian dana/uang/barang/jasa kepada pihak penerima kredit akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan bersama.
4. Unsur resiko, yaitu adanya perbedaan antara pemberian kelebihan dana/uang/barang/jasa dengan waktu pengembaliannya, sehingga hal ini menimbulkan resiko bagi si penerima kredit.

A. Fungsi Kredit

Fungsi pokok dari kredit pada dasarnya adalah untuk memenuhi jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasa bahkan konsumsi yang kesamaannya itu ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :

- a. Kredit dapat meningkatkan utility (daya guna) dari uang

Para penabung dapat menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito atau tabungan, oleh pihak bank uang tersebut ditingkatkan dayagunanya, guna suatu usaha peningkatan produktifitas.

b. Kredit meningkatkan utility (daya guna) suatu barang

Dengan modal/uang yang diperoleh melalui bantuan kredit bank, seorang produsen dapat melakukan kegiatan usahanya sebagai berikut :

- Memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.
- Memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaanya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Kredit meningkat peredaran dan lalu lintas uang.

Kredit disalurkan melalui rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro, bilget, wesel dan promes.

d. Kredit menimbulkan keyakinan berusaha masyarakat

Kekurangmampuan seseorang pengusaha pada umumnya adalah dibidang permodalan, oleh karena itulah ia akan selalu berhubungan dengan Bank untuk memperoleh bantuan permodalan melalui kredit guna meningkatkan kegiatan usahanya.

B. Tujuan Kredit

Apabila berbicara mengenai tujuan kredit maka dapat dilihat dari berbagai sudut pemberi kredit (bank) dan dari penerima kredit :

1. Dari sudut pemberi kredit

UPT-PUSTAK-UNDIP

Tujuan kreditur atau pemberi kredit untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga uang merupakan balas jasa dari pinjaman yang diberikan kepada seseorang.

2. Dari sudut penerima kredit

Tujuan kredit adalah untuk mendapatkan bantuan prestasi (uang/barang/jasa) dengan kewajiban mengganti bunga pada waktu tertentu. Bantuan yang diperoleh debitur dapat berupa uang, barang dan jasa, dapat pula berupa ketiga jenis benda tersebut.²⁸⁾

Dari kedua tujuan kredit tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kredit adalah penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

C. Penilaian Kredit

Tujuan diadakannya penilaian kredit adalah agar kredit yang akan diberikan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :²⁹⁾

a. Keamanan kredit (safety)

Artinya harus benar-benar diyakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali.

b. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (suitability)

Yaitu kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

²⁸⁾ Mudarsyah Sinungan, *Seluk Beluk Kredit dan Teknik Pengelolaan*, Yograt, Jakarta, 1979, hal 14

²⁹⁾ Prathama Rahardjo, *Uang dan Bank*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1990, hal 107

- c. Menguntungkan (Provitable) baik bagi bank sendiri maupun bagi nasabah dalam melakukan kegiatan usahanya..

Ada beberapa prinsip penilaian kredit yaitu prinsip “5 C of credit” dan “4 P” prinsip 5 C terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Ekonomi, sedangkan prinsip 4 P adalah Personality, Purpose, prospect dan Payment. Yang dimaksud dengan The Five C 5 of Credit Analisis yaitu :

1. Character (kepribadian, watak)

Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apabila ia dapat memenuhi kewajiban dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan.

2. Capacity (kemampuan kesanggupan)

Yang dimaksud dengan capacity adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam mengembangkan fasilitas kredit yang diberikan.

3. Capital (modal, kekayaan)

Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia/telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit.

Dalam meneliti capital, yang perlu diteliti antara lain :

- Apakah perusahaan calon nasabah mempunyai modal yang cukup untuk dapat menjalankan usaha.
- Bagaimana modal itu ditempatkan oleh calon nasabah.
- Sampai sejauhmana modal usaha nasabah dapat diuangkan dengan mudah dan cepat tanpa kehilangan nilainya.

4. Collateral (jaminan, agunan)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon nasabah dan usahanya, baik bonafiditas maupun salvabilitas.

5. Condition of economy

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit tidak saja dengan kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah berada. Misalnya keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon nasabah.

Agar bank atau pemberi kredit jangan sampai rugi maka bank harus menyelidiki sebaik-baiknya unsur 5 C of Credit tersebut. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah resiko yang terjadi dikemudian hari yang disebut kredit macet.³⁰⁾

Sedangkan prinsip penilaian kredit yang lainnya adalah menggunakan prinsip 4 P yang terdiri atas ;

a. Personality

Personality ini menyangkut kepribadian si peminjam (calon nasabah), seperti riwayat hidup, hobby, keadaan keluarga, sosial standing dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.

b. Purpose

Hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit.

c. Payment

Kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya.

³⁰⁾ Mgs. Edy Putro Tje Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty Yogyakarta, 1985, hal 12 – 15.

d. Prospect

Yang dimaksud dengan prospect di sini adalah harapan masa depan dari usaha si pemakai.³¹⁾

C.2. PERJANJIAN KREDIT

A. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku

Pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis, yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara pihak, akan tetapi perjanjian itu dibuat oleh salah satu pihak dengan cara menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak kemudian diberikankan kepada pihak lain untuk disetujui, dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat yang di berikankan itu. Perjanjian yang demikian inilah yang dinamakan perjanjian baku atau perjanjian standar.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam transaksi perbankan adalah bank yang bersangkutan) dan pihak lain (dalam transaksi perbankan adalah nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.³²⁾

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standart contract*. Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai

³¹⁾ Purwahid Patrik, *Segi-segi Keperdataan Masalah Kredit Macet*, Makalah Pada Disnatis ke-9 Universitas Muhammadiyah Magelang, 1993.

³²⁾ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal . 3

sebagai patokan. Dalam hubungan ini perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan penguasa.³³⁾

Perjanjian baku menurut Mariam Darus Badruzaman adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan ke dalam bentuk formulir.³⁴⁾

Perjanjian baku kadang tidak memperhatikan isinya, tetapi hanya menekankan pada bagian pentingnya dengan janji-janji atau klausula yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku.³⁵⁾

Menurut Sutan Remy Syahdeini yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk menandingkan atau meminta perubahan.³⁶⁾

Kalau kita lihat pengertian diatas maka perjanjian kredit adalah perjanjian baku atau perjanjian standard, karena di dalam praktek, setiap bank telah menyediakan blangko (formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (standar form). Formulir ini disodorkan kepada setiap pemohon kredit. Isinya tidak diperbincangkan dengan penahan. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut di dalam formulir itu atau tidak. Hal-hal yang kosong (belum diisi) di

³³⁾ Abdulkadir Muhammad, op.cit, hal. 6

³⁴⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Jakarta, 1981, hal. 58

³⁵⁾ Ibid, hal 60

³⁶⁾ Sutan Remy Syahdieni, *Kebebasan Berkontrakt dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Penjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Intisari bankir Indonesia, 1993, hal 66

dalam blanko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin di isi sebelumnya yaitu antara lain jumlah pinjaman, bunga, tujuan dan jangka waktu kredit.

A. Perjanjian Kredit dan Upaya Pengamanannya

Di dalam perjanjian kredit terdapat klausula yaitu jika masing-masing pihak tidak memenuhi kewajiban, maka pemohon kredit tidak mempergunakan kredit ataupun karena sesuatu hal sesuai dengan penilaian pihak bank tidak menyerahkan uang, maka keduanya tidak saling mengadakan tuntutan.

Perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidaklah sama, hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang tertentu karena undang-undang tidak menentukannya tetapi lazimnya dalam praktek bentuk dari perjanjian kredit adalah secara tertulis.

Isi perjanjian kredit yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu bentuk tertentu. Perjanjian yang demikian dapat dikatakan sebagai perjanjian baku atau perjanjian standart atau Standard Contract.

Di dalam Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 maupun didalam Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank. Sedangkan menurut hukum perdata Indonesia perjanjian kredit adalah salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan 1769 KUH Perdata.

Marhenis Abdul Hay berpendapat bahwa ketentuan pada Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam pengganti kredit mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank yaitu bahwa :³⁷⁾

Perjanjian pinjam pengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Sementara itu Prof. Wiryono Projodikoro menafsirkan bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 1754 KUH Perdata itu adalah sebagai persetujuan yang bersifat "riil". Hal ini dapat dimaklumi, oleh karena Pasal 1754 tidak menyebutkan bahwa pihak pertama "mengikat diri untuk memberikan" suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis, melainkan bahwa pihak pertama "memberikan" suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian.³⁸⁾

Selanjutnya Prof. Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Perjanjian ini bersifat konsensual obligator dan penyerahan uangnya sendiri bersifat riil.

³⁷⁾ Marhenis Abdul Ray, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, Pradya paramita, 1979, hal 147

³⁸⁾ Wiryono Projodikoro, *Pokok-pokok Hukum Perdata tentang Persetujuan tertentu*, Bandung, Sumur, 1981, hal 137

Jadi pada saat penyerahan uang dilakukan barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.³⁹⁾

Beberapa fungsi dari perjanjian kredit menurut Ch. Gatot Wardoyo adalah :⁴⁰⁾

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
4. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan Perbankan. Hal ini disebabkan karena perjanjian kredit merupakan media perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Berlakunya perjanjian kredit adalah pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit. Hal ini dapat menimbulkan kerugian pada nasabah penerima kredit dalam 2 hal yaitu :

- a. Untuk agunan yang diikat pada perjanjian kredit, maka perjanjian jaminan akan berlaku pada saat perjanjian kredit dibuka, sedangkan pada saat itu hutang belum ada. Hal ini bertentangan dengan sifat *accessoir* perjanjian jaminan.

³⁹⁾ Mariam Darusbadruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, 1983, hal 28

⁴⁰⁾ CH. Gatot Wardoyo, *Sekitar Klausul-klausul Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, 1985, hal 164

- b. Kalau perjanjian kredit disertai bunga, maka bunga diperhitungkan pada saat perjanjian kredit dibuka. Hal ini juga bertentangan dengan sifat perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil karena pada saat itu hutang belum ada.⁴¹⁾

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang prestasinya adalah “memberikan sesuatu” (Pasal 1234 KUH Perdata). Artinya apabila di dalam perjanjian “memberikan sesuatu” para pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak berhak menuntut pemenuhan baik disertai atau tanpa ganti rugi, pembubaran baik disertai atau tanpa ganti rugi, atau ganti rugi saja.

Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak mempunyai bentuk yang tertentu karena undang-undang tidak menentukannya tetapi lazimnya dalam praktek bentuk dari perjanjian kredit adalah secara tertulis.

Upaya pengamanan kredit merupakan mata rantai kegiatan bank, untuk memperkecil didalam pemberian kredit. Seperti kita ketahui bahwa didalam kehidupan bank sehari-hari adalah lazim bahwa bank mengalami kekurangan dana, yang apabila tidak segera diatasi dapat mengancam eksistensi bank tersebut.

Bank sebagai suatu lembaga kepercayaan masyarakat dan sangat besar pengaruhnya terhadap kepentingan masyarakat banyak. oleh karena itu sepanjang tindakan bank untuk menolak penarikan kredit yang dapat mengancam keadaan likuiditas bank tersebut, terutama kepentingan para nasabah penyimpan dana, maka ketentuan yang memberikan hak kepada bank untuk melakukan penolakan

⁴¹⁾ Mariam Darus Badruzaman, op cit, hal 28 - 29

itu tidak dapat dinilai sebagai ketentuan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan keadilan tetapi justru untuk menjaga kepentingan umum.

Disamping itu usaha pengamanan yang dilakukan pihak bank ini juga terkait pula dengan prinsip kehati-hatian dengan mengingat pada Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan 1998 yang isinya adalah "Dalam memberi kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mencegah dananya kepada bank.

Langkah yang diambil bank dalam mengamankan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengamanan preventif dan pengamanan represif.

Pengamanan preventif adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit. Sedangkan pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit, kredit yang telah mengalami ketidaklancaran atau kemacetan (debious). Dengan demikian pengamanan kredit pada hakekatnya adalah memperkecil resiko, bahkan sampai pada menghilangkan resiko yang mungkin timbul maupun sudah timbul/terjadi.

C. Mekanisme Perlindungan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit

Beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan baru

Lewat pembuatan peraturan baru dibidang perbankan atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank.

2. Pelaksanaan peraturan yang ada

Salah satu cara lain untuk memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada dibidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin (~~Low-Enforcement~~) yang baik.

3. Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito

Perlindungan nasabah, khususnya deposan melalui lembaga deposito yang adil dan preditable ternyata dapat juga membawa hasil yang positif.

4. Memperketat perijinan bank

Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan kualified sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya.

5. Memperketat pengaturan dibidang kegiatan bank

Ketentuan yang menyangkut dengan kegiatan bank banyak juga bertujuan secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk melindungi nasabah.

6. Memperketat pengawasan

Dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank, maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia harus melakukan tindakan

pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada, baik terhadap bank-bank pemerintahan maupun terhadap bank swasta.

D. TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN BAKU

D.1. Pengertian Perjanjian Baku

Pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis, yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara pihak, akan tetapi perjanjian itu dibuat oleh salah satu pihak dengan cara menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak kemudian disodorkan kepada pihak lain yang sudah d. setuju, dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan itu. Perjanjian yang demikian inilah yang dinamakan perjanjian baku atau perjanjian standar.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya (dalam transaksi perbankan adalah bank yang bersangkutan) dan pihak lain (dalam transaksi perbankan adalah nasabah dari bank tersebut) pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁴²⁾

Perjanjian baku di atas pada prinsipnya mempunyai arti yang sama. Perjanjian baku dapat dirumuskan dalam pengertian bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian baku kadang tidak memperhatikan isinya, tetapi hanya

⁴²⁾ Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal . 3

menekankan pada bagian pentingnya dengan janji-janji atau klausula yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menggunakan perjanjian baku.⁴³⁾

Perjanjian baku lahir sebagai akibat dari perubahan masyarakat. Pitlo mengemukakan latar belakang timbulnya perjanjian baku adalah adanya kesenjangan sosial ekonomi. Perusahaan yang besar, perusahaan pemerintah, mengadakan kerjasama dengan debitur, dan untuk kepentingannya mereka menentukan syarat sepihak. Pihak lawannya yang pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah, baik karena posisinya atau karena ketidaktahuannya, hanya menerima yang disodorkan itu.⁴⁴⁾

D.2. Jenis-jenis Perjanjian Baku

Perjanjian baku yang terdapat dimasyarakat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain :⁴⁵⁾

1. Perjanjian Baku Sepihak

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya dibuat oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu.

2. Perjanjian Baku Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu.

3. Perjanjian Baku yang ditentukan dikalangan Notaris dan Advokat

⁴³⁾ Ibid, hal 24

⁴⁴⁾ Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hal. 61

⁴⁵⁾ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hal.11

Perjanjian baku disini berkaitan dengan perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disiapkan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat.

Bentuk perjanjian dengan syarat-syarat baku umumnya terdiri atas :⁴⁶⁾

a. Dalam bentuk dokumen

Merupakan suatu perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak. Biasanya memuat persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan atau berakhirnya perjanjian itu.

b. Dalam bentuk persyaratan-persyaratan dalam perjanjian

Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk lain seperti yang termuat dalam berbagai kuitansi, tanda penerimaan atau tanda penjualan, kartu-kartu tertentu.

⁴⁶⁾ Az.Nasution.*Hukum Perlindungan Konsumen(suatu pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hal. 95-96

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani “Metodos” yang artinya adalah “Cara “ atau “Jalan”. Dikaitkan dengan penelitian ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja. Yaitu cara kerja untuk dapat memahami sesuatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁴⁷⁾

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam membuat karya ilmiah, maka tidak dapat terlepas dari penggunaan dari metode-metode yang tepat pula, yaitu suatu metode-metode yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode yang diterapkan dalam setiap penelitian ilmu akan selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang sudah menjadi dasarnya.

Dengan demikian suatu metodologi yang dipakai akan mempunyai suatu ciri-ciri tertentu yang mempunyai kekhususan dan merupakan identitasnya, karena itulah ilmu hukum dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

Menurut Ronny Hanitijo Seomitro tentang penelitian hukum, bahwa :

“Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi Penelitian Hukum Normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer”.⁴⁸⁾

⁴⁷⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif*, Rajawali Jakarta 1983, hal 5

⁴⁸⁾ Ronny Hanitijo Seomitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Graha Indonesia, Jakarta 1990, hal 9.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah, metode Yuridis Empiris yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian dari lapangan) dan data sekunder.

Pendekatan Yuridis yaitu meliputi hukum hanya sebagai *hukum in book*, yaitu dalam mengadakan pendekatan, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang masih berlaku digunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris yaitu suatu pendekatan yang timbul dari pola berfikir dalam masyarakat dan kemudian diperoleh suatu kebenaran yang harus dibuktikan melalui pengalaman secara nyata di dalam masyarakat.

B. Spesifik Penelitian

Spesifik penelitian yang akan digunakan adalah Deskriptif Analitis, yaitu hasil yang akan diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang keefektifan perjanjian kredit dalam pengamanannya kepada kreditur pada BNI'46 Cabang Undip Semarang, yang kemudian di analisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan BNI' 46 Cabang Undip Semarang.

D. Penetapan Populasi Sampel

D.1. Populasi adalah sejumlah keseluruhan dari unit-unit yang ciri-cirinya

dapat diduga atau sebagai keseluruhan individu yang menjadi subjek penelitian yang nantinya akan dikenal generalisasinya.⁴⁹⁾

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Bank BNI⁴⁶ cabang Undip Semarang

D.2. Sampling adalah bagian dari individu atau populasi yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel ditentukan melalui Purposive Sampling, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga sehingga tidak mengambil sampel dalam jumlah yang banyak. Purposive Sampling adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel ini terdapat wakil dari segala lapisan populasi. Dengan demikian diusahakan agar sampel itu memiliki ciri-ciri yang essensial dari populasi sehingga dapat dianggap cukup representative. Ciri-ciri apa yang essensial, strata apa yang harus diwakili, bergantung pada penelitian atau pertimbangan atau judgment penelitian. Itu sebab purposive sampling disebut juga judgmental sampling.

Seperti yang dikemukakan oleh Mardalis yaitu : "Penggunaan purposive sampling mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

⁴⁹⁾ Ronny Hanitijo Seomiro, Ibid, hal 525

Penggunaan teknik ini senantiasa didasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya".⁵⁰⁾

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Pejabat dan Karyawan Bank BNI'46 Cabang Undip Sebanyak 2 orang
2. Tiga orang nasabah BNI'46 yang bermasalah

D.3.Responden

Mengenai responden dalam penelitian ini adalah : pihak pejabat

Bank BNI'46 disamping itu juga nasabah yang bermasalah .

E. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini terdiri dari : data primer dan data sekunder

* Data primer adalah berupa data yang langsung didapat dalam penelitian di lapangan. Data yang di peroleh melalui wawancara secara mendalam (depth Interview) dan pengamatan (observasi) di lapangan. Wawancara dilakukan dengan pejabat pegawai Bank BNI'46 di samping itu juga para nasabah bank BNI yang bermasalah

* Data sekunder di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berupa laporan, peraturan perundang-undangan Perbankan.

Di dalam bukunya tentang metode penelitian hukum Ronny Hanitijo Seomitra membagi jenis dan sumber data atas dua bagian yaitu :

⁵⁰⁾ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta 1989, hal 58.

“data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa norma dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Yurisprudensi, Traktat dan peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organiknya. Bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tertier berupa Bibliografi dan Indeks Kumulatif”⁵¹⁾

F. Metode Penyajian Data

Setelah semua data terkumpul dan sudah dianggap cukup, selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan data-data yang disebut Editing. Dalam editing semua data-data diperiksa dan diteliti untuk menjamin apakah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan sekaligus dilakukan pembatalan data yang keliru. Demikian juga dapat di tambah untuk melengkapi data-data bila dianggap masih perlu atau masih kurang lengkap. Setelah proses pengolahan data selesai selanjutnya data tersebut di sajikan secara sistematis sebagai suatu laporan dalam bentuk tesis.

⁵¹⁾ Ronny Hanitijo Seomiro, Op Cit, hal 52.

G. Analisa Data

Metode Analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, kualitatif artinya menguji data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan dan studi lapangan. Sehingga hasil analisa akan disusun secara teoritis dalam bentuk tesis.

Maka untuk menggambarkan keabsahan data yang telah dinyatakan valid, kemudian dibuat acuan dasar yang berupa proses Keefektifan Perjanjian Kredit Bank Dalam Pengamanan Kepada Kreditur Pada PT. Bank BNI⁴⁶ Undip Semarang, untuk menganalisa data, yaitu dengan metode :

a. Analisis Domein

yaitu untuk memperoleh suatu pengertian yang sifatnya umum dan relatif tentang keseluruhan dalm suatu pokok permasalahan yang telah diteliti.

b. Analisis Taksonomis

Analisa Taksonomis ini merupakan analisa yang lebih rinci dan lebih mendalam. Pada analisa ini fokus dari suatu penelitian di tetapkan berdasarkan pada domein tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi sasaran dari penelitian.

c. Analisis Komponensial

Dalam analisa ini yang akan adalah kontras antara elemen yang terlihat dalam domein, yang mana dalam hal ini diberlakukan melalui observasi atau wawancara dan interview dari pihak yang terpilih.

d. Analisis Tema Kultural

Analisa Tema Kultural merupakan suatu proses guna menemukan tema-tema yang keberadaannya termanifestasi atau menjelma secara luas dalam kawasan keseluruhan atau sejumlah domein yang mana akan memunculkan suatu hubungan yang mengintegrasikan lintas domein yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

A.1. GAMBARAN UMUM BANK NEGARA INDONESIA'46

A.1.1. Sejarah Berdirinya BNI'46

Berdirinya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia. Pada Sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945, di putuskan untuk mendirikan sebuah Bank milik Negara yang berfungsi sebagai Bank Sirkulasi atau Bank Sentral. Untuk itu Pemerintah memberikan surat kuasa kepada Bapak R.M Margono Djokohadikusumo (Alm), untuk mempersiapkan pembentukannya.

Sebagai langkah pertama di dirikanlah Yayasan Poesat Bank Indonesia yang disahkan dengan Akte Notaris R.M.Soerojo No. 14 tanggal 9 oktober 1945. walaupun menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan, pada tanggal 5 juli 1946 berhasil di dirikan Bank Sirkulasi atau Bank Sentral milik Negara Republik Indonesia dengan nama Bank Negara Indonesia (BANK NEGARA INDONESIA) dengan landasan hukum peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.2 tahun 1946, sehingga dapat di katakan bahwa Yayasan Poesat Bank Indonesia merupakan embrio bagi lahirnya Bank Negara Indonesia 1946.

Kedudukan Bank Negara Indonesia 1946 mengalami perubahan pada saat Konfrensi Meja Bundar (KMB) di mana Pemerintah Indonesia dan Belanda

memutuskan dan menetapkan De Javasche Bank (sekarang Bank Indonesia) sebagai Bank Sentral atau Bank Sirkulasi, sehingga Bank Negara Indonesia berfungsi sebagai Bank Umum Milik Pemerintah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taufik, SE Bagian Kredit bahwa Bank BNI 46 Cabang Undip Semarang terletak di jalan Imam Bardjo Semarang, merupakan sebuah lokasi yang strategis untuk bisnis perbankan karena berada pada lokasi yang dekat dengan lokasi bisnis lain (Simpang lima) pusat pemerintahan, Bank Indonesia Kanwil Jateng, dan Perguruan Tinggi (Universitas Diponegoro).

Untuk produk yang ditawarkan di BNI Undip meliputi tabungan Taplus, Taplus Utama, KTM, Tabungan haji, Tabungan Simponi serta berbagai jenis giro dan deposito. Kredit yang ditawarkan di BNI cabang Undip meliputi kredit ekspor.

A.1.2. Kegiatan Usaha BNI 46

Kalau kita mencermati isi Pasal 6 sampai Pasal 15 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kegiatan usaha bank telah dinilai dan dibatasi, yakni : Pertama, mengatur kegiatan usaha yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh bank; kedua, kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat ; dan ketiga, bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu.

Secara garis besar dapat digolongkan empat bagian :

- a. Simpanan giro/rekening koran

Simpanan giro merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- Sebagai alat pembayaran giral.
- Penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan sepanjang dananya tersedia.
- Penarikannya mempergunakan surat warkat, atau sarana perintah pembayaran baik yang bersifat tunai maupun dengan cara pemindahan bukuan belaka.⁵²⁾

b. Simpanan Deposito (Deposito Berjangka)

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Perbankan Tahun 1998. disebutkan deposito (atau deposito berjangka) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Jadi penarikan simpanan deposito waktunya sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian dan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan. Dengan demikian deposito merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank yang ciri-ciri adalah sebagai berikut :

- Surat yang berharga yang diterbitkan oleh bank berdasarkan atas nama, sehingga tidak dapat dijualbelikan.
- Jangka waktu penarikannya telah ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁵²⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik, SE Bagian Kredit, tanggal 4 September 2003.

- Bunga dibayar setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus pada saat jatuh tempo.
- Dapat dijadikan jaminan kredit.
- Penyerahan hak cukup dengan cara lessie..

c. Sertifikat deposito

Dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang Perbankan 1998., yang dimaksud dengan sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tanggalkan. Sertifikat deposito adalah surat berharga yang diterbitkan atas dari bank dan dapat dijual belikan dalam pasar uang.

d. Simpanan tabungan

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cak, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada nasabahnya akan diberikan atau menerima buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Dengan demikian tabungan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan yaitu dengan Bapak Taufik, SE Bagian kredit Bank Negara Indonesia⁴⁶ Cabang Undip melayani kebutuhan bagi

seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai macam produk, jasa, dan layanan perbankan diantaranya sebagai berikut.⁵³⁾

A. Jenis-jenis Simpanan

Simpanan merupakan produk dana dimana Bank Negara Indonesia Cabang Undip dapat menghimpun dana dari masyarakat.

1. Giro

Simpanan nasabah dalam rekening yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

2. Deposito

Simpanan dana rupiah atas valas nasabah dalam rekening yang dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu.

3. Sertiplus

Surat berharga atas untuk yang dikeluarkan Bank Negara Indonesia sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

4. Tabungan Plus

Simpanan dana rupiah nasabah perorangan dalam rekening (buku tabungan) yang dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu dengan memakai slip setoran/pengambilan / kwitansi.

⁵³⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik, SE Bagian Kredit, tanggal 5 September 2003

5. Tabungan Kesejahteraan (Takesra)

Produk tabungan yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama antara Bank Negara Indonesia, BKKBN, dan PT Pos Indonesia (Persero), yang pengelolanya dilakukan oleh Pos Indonesia.

6. Tabungan Amanat atau Tabungan Haji Indonesia (THI)

Simpanan dalam tabungan, khusus bagi masyarakat yang mempunyai niat untuk mewujudkan rencana melaksanakan ibadah (Haji, Umroh, Khitan, Pernikahan, dan sebagainya).

7. Dollar Plus

Simpanan secara perorangan dalam bentuk valas yang penarikan dan penyetorannya dilakukan setiap saat.

B. Jenis-jenis Kredit Bank Negara Indonesia Cabang Undip

1. Kredit Investasi

Kredit yang digunakan untuk membantu perusahaan memenuhi atau mengadakan investasi untuk mendirikan usaha baru atau mengembangkan usaha.

2. Kredit Modal Kerja

Kredit untuk membantu meningkatkan atau memperlancar pembelian bahan baku, biaya produksi dan biaya pemasaran.

3. Kredit Ekspor

Kredit untuk membantu pengusaha dalam mengadakan barang untuk diekspor.

4. Kredit Impor

Kredit yang membantu pengusaha dalam rangka pembelian barang-barang luar negeri yang dibutuhkan di dalam negeri.

5. Kredit Konsumtif

Kredit yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka mengadakan atau memiliki sarana yang diperlukan.

6. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

Kredit untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan.

7. Kredit Kelayakan Usaha (KKU)

Kredit untuk membantu pengusaha kecil menghimpun usahanya dengan persyaratan ringan dengan jumlah pinjaman maksimal Rp. 50 juta.

8. Kredit Tenaga Kerja Indonesia (KTKI)

Kredit untuk membantu calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri khususnya biaya awal yang dibutuhkan.

9. Kredit Usaha Kecil (KUK)

Kredit untuk membantu pengusaha kecil dalam rangka mengembangkan usahanya sehingga menjadi pengusaha yang mapan.

10. Kredit Keluarga Sejahtera (KUKESRA)

Kredit Keluarga Sejahtera merupakan kredit untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 melalui

pengembangan usaha produktif, selain juga mendidik masyarakat agar gemar menabung dan menggunakan jasa perbankan.

11. Kredit Profesi

Kredit perseorangan yang diberikan kepada dokter, akuntan, konsultan, pengacara, dan otaries.

12. Cash Collateral Credit (CCC)

Kredit dengan fasilitas khusus untuk pemegang Deposito/ Setiplus/Giro dari Bank Pemerintah, Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional, dan Bank Asing yang ditetapkan Bank Negara Indonesia.

C. Jenis-jenis Jasa Layanan Bank Negara Indonesia Cabang Undip.

Dalam rangka untuk melayani kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka Bank Negara Indonesia Cabang Undip memberikan jasa/pelayanan perbankan. Adapun jasa/layanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kiriman Uang Dalam Negeri

Dengan jasa ini transaksi/kiriman uang akan lebih efektif dan efisien. Bank Negara Indonesia memiliki kantor cabang yang terbesar dikota-kota bisnis diseluruh Indonesia sehingga jasa layanan ini akan memperlancar aktifitas bisnis di Indonesia.

2. Kiriman Luar Negeri

Jasa layanan Bank Negara Indonesia untuk menghimpun uang tak terbatas untuk dalam negeri saja. Bank Negara Indonesia juga menyediakan

layanan transfer luar negeri. Transfer luar negeri dilaksanakan dalam valuta asing yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia.

3. Inkaso

Inkaso merupakan layanan untuk tagihan pembayaran atas surat/dokumen berharga kepada pihak ketiga dari tempat atau kota lain dalam negeri. Surat berharga yang dapat diinkasokan antara lain : wesel, draft, giro bilyet, kwitansi, surat promes/askep, dan hadiah undian (lotre)

4. Save Deposit Box (SDB)

Save Deposit Box adalah jasa pelayanan untuk menyimpan barang/dokumen berharga selama jangka waktu tertentu di dalam box tahan api dan dijaga dengan sistem pengaman yang mutakhir. Barang/dokumen berharga yang dapat disimpan berupa saham, obligasi, surat wasiat, perhiasan, batangan emas murni, kunci lemari besi dan barang / dokumen lainnya.

5. Ongkos Naik Haji (ONH)

Bank Negara Indonesia melayani penerimaan ONH. Dalam penerimaan ONH ini Bank Negara Indonesia menggunakan teknologi mutakhir yang disebut Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Dengan sistem ini Bank Negara Indonesia mempunyai hubungan langsung dengan departemen Agama yang mengatur proses pemberangkatan jemaah haji. Berkat hubungan langsung dengan departemen Agama, calon jemaah haji yang menyeter ONH melalui Bank Negara Indonesia memperoleh jaminan menunaikan ibadah haji.

6. Garansi Bank (BG)

Setoran uang tunai nasabah untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin apabila dikemudian hari ternyata gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang dijanjikan atas dasar transaksi yang telah telah dibuatnya dengan pihak lain/penerima jaminan.

7. Traveller Cheque (TC)

Alat pembayaran yang sangat aman bagi yang akan melakukan perjalanan keluar negeri. TC dituangkan berdasarkan kurs valas beli yang berlaku pada bank setempat dengan cara yang sangat mudah.

8. Ekspor

Menjamin pembayaran bagi eksportir yang menjual barang ke luar negeri. Jaminan pembayaran dari importer ini selagi dokumen/persyaratan yang diminta importer sudah dipenuhi oleh eksportir.

9. Impor

Perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam suatu wilayah pabean Indonesia dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Bank Negara Indonesia melayani impor melalui jaringan online perbankan Internasional (SWIFT) sehingga transaksi impor diproses cepat dan tepat waktu.

10. Jasa Custody

Jasa layanan pemberian informasi dan jasa lainnya yang berkaitan dengan surat berharga baik yang dipasarkan di pasar modal seperti saham, obligasi

maupun yang tidak diperdagangkan seperti komersial Paper, Bilyet Deposito, Bilyet Sertifikat BI (SBI) dan lain-lain.

11. Delegasi Kredit

Delegasi kredit adalah kredit pembayaran jumlah uang secara berkala pada perorangan atau badan usaha dalam jumlah dan jangka waktu tertentu dilakukan atas permintaan nasabah pengirim. Surat Kredit Berdokumen

12. Transplus

Merupakan produk gabungan antara kiriman uang (transfer) dengan tabungan plus (Taplus) dalam satu piket pelayanan.

13. Bank Negara Indonesia Master Card

Bank Negara Indonesia Master Card merupakan perpaduan antara layanan dengan Bank di seluruh dunia, dimana Bank Negara Indonesia mempunyai reputasi internasional yang terpercaya, kokoh dan bersahabat dengan Master Card Internasional sebagai Bank Credit Card yang telah diakui diseluruh dunia.

14. Bank Negara Indonesia Infonas

Jenis layanan Bank Negara Indonesia untuk memberikan segala informasi baik masalah produk dan jasa Bank Negara Indonesia maupun informasi lainnya yang dibutuhkan nasabah.

15. Jasa Pembayaran

Jenis pelayanan yang dilakukan Bank Negara Indonesia untuk melayani pembayaran rekening listrik, telepon, pajak dan sebagainya.

16. Bank Negara Indonesia Calls atau Phoneplus

Layanan informasi dan transaksi perbankan yang dapat dilakukan melalui telepon selama 24 jam 7 hari.

17. Layanan Prima

Jenis pelayanan yang diberikan kepada nasabah setiap hari dengan keramahan para staff front office

18. Automatic Teller Machine (ATM)

Jenis layanan bagi nasabah/pemegang rekening Taplus, Giro, Taplus Utama dalam melakukan transaksi perbankan selama 24 jam melalui sarana ATM di seluruh Indonesia.

A.1.3. Aturan-aturan Dasar Yang Harus Diperhatikan Agar Klausula Klausula Dalam Perjanjian Kredit Mengikat Debitur.

Dengan digunakannya perjanjian baku dalam pemberian kredit maka kita harus memperhatikan aturan-aturan dasar yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam menggunakan perjanjian-perjanjian baku tersebut.

Aturan-aturan dasar yang harus di perhatikan dalam perjanjian baku adalah sebagai berikut :

1. Makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang dalam transaksi bisnisnya sehari-hari menggunakan perjanjian baku.
2. Makin banyaknya penduduk Indonesia yang dalam kehidupannya sehari-hari sangat membutuhkan jasa-jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut diatas, bahkan mereka tidak dapat mengelak dari jasa itu. Pada umumnya mereka ini adalah para konsumen yang

kedudukannya lemah yang berhadapan dengan perusahaan yang kuat yang karena kedudukannya yang lemah tersebut perlu dilindungi.

3. Makin banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang bertransaksi dagang di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan Indonesia dengan mempergunakan perjanjian-perjanjian baku yang biasanya digunakan dinegara asasnya. Tidaklah mustahil bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku itu, yang dinegara asalnya mungkin saja dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum mereka tetapi di Indonesia dapat dirasakan sebagai sesuatu yang memberatkan bagi perusahaan Indonesia yang menjadi counterpartnya, yang pada umumnya kedudukan mereka masih lemah.

Apabila kita melihat kembali mengenai aturan-aturan dasar bagi berlaku dan mengikatnya klausula-klausula perjanjian baku maka dapat dibagi dalam dua jenis aturan dasar, yaitu yang *pertama* ialah yang menyangkut isi dari perjanjian baku. Dan yang *kedua* adalah yang menyangkut cara klausul tersebut disajikan atau dihadirkan oleh pihak yang menyodorkan perjanjian baku tersebut.⁵⁴⁾ Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalam tetapi persetujuan itu diharuskan oleh kepatutan biasa, atau Undang-Undang.

Dengan demikian sebenarnya Pasal 1337 dan 1339 KUHPdata mempunyai tujuan yang sama. Dan apabila telaah maka tolak ukur yang pertama dikatakan bahwa Undang-Undang adalah tolak ukur yang pertama sedangkan

⁵⁴⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik, SE Bagian Kredit, tanggal 5 September 2003.

mengenai moral dan ketertiban umum adalah tolak ukur relatif menurut Wiryono Projkoro karena tidak sama diseluruh dunia yaitu tergantung pada sifat-sifat kehidupan negara masing-masing.

Itikad baik ini berlaku mulai akan adanya perjanjian. Sampai dengan berakhirnya perjanjian. Sehingga dapat dikatakan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata ini merupakan ketentuan yang tidak dapat disampingi oleh para pihak. Dengan kata lain bahwa sekalipun para pihak telah sepkat untuk memuat suatu ketentuan dalam perjanjian yang sifatnya demikian berat sebelah sehingga dirasakan tidak ada namun tetap saja ketentuan itu tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan asas itikad baik itu.

Berkembangnya konsep mengenai penyalahgunaan keadaan. Terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya ketentuan di KHUPerdata yang mengatur tentang hal itu. Sehingga dalam hal seorang hakim menemukan adanya yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan yang membatalkan perjanjian itu. Dan pertimbangan hakim tidak didasarkan pada salah satu alasan pembatalan seperti berupa kesesatan (*dwaling*) paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*).

Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak ; menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksud menjadi tidak dibolehkan tetapi menyebabkan kehendak disalahgunakan menjadi tidak bebas.⁵⁵⁾

⁵⁵⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Lutfi, SH, nasabah BNI'46, tanggal 6 September 2003.

A.1.4. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit

Bank Negara Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Berdasarkan kedua fungsi tersebut yaitu fungsi pengedaran dana dan fungsi penyaluran dana, maka terlihat adanya dua hubungan hukum antara Bank Negara Indonesia dan nasabah yaitu :

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpanan dana,
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Berkaitan dengan dua hubungan hukum antara bank dan nasabah tersebut diatas, maka dapat dilihat dari bentuk dan asas-asas yang dapat hubungan hukum tersebut. Oleh karena dalam pembahasan ini hanya menyangkut masalah perjanjian kredit maka yang akan dibahas hanya masalah hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Mengenai masalah bentuk hubungan hukum perjanjian kredit bank ternyata di dalam KUHPdata tidak ada satu Pasal pun yang mengaturnya, maka penetapan mengenai bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur itu harus digali dari sumber lain diluar KUHPdata.

Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kredit pada Bank BNI⁴⁶ Cabang Undip Semarang telah ditentukan dalam surat persetujuan kredit. Hak dan kewajiban para pihak tersebut, yaitu :²⁰⁾

²⁰⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik, SE Bagian Kredit, tanggal 7 September 2003.

A. 1. Hak-hak dari PT. Bank BNI'46 Cabang Undip Semarang :

1. Berhak menerima dana atau uang dari pengembalian kredit baik berupa angsuran pokok maupun bunga.
2. Berhak menagih utang (kredit) atau sisanya berikut bunga, denda dan lain-lain ongkos dengan seketika apabila :
 - a. Pengambil kredit melalaikan kewajibannya membayar angsuran pokok, bunga, denda dan lain-lain.
 - b. Pengambil kredit meninggal dunia, kecuali ahli waris dari yang meninggal dunia dapat memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang.
 - c. Pengambil kredit dinyatakan pailit, dibawah pengawasan pengampu (order coratite) atau karena apapun tidak berhak lagi mengurus atau menguasai kekayaan.
 - d. Kekayaan pengambil kredit seluruhnya atau sebagian disita oleh orang lain.
 - e. Pengambil kredit menurut perhitungan bank tidak atau tidak cukup peraturan yang ditetapkan dalam akte ini.
3. Berhak memegang bukti pemilikan barang agunan dan menguasai atas barang yang diserahkan oleh debitur tersebut sebagai agunan.
4. Berhak menarik kreditnya dengan segera apabila penggunaan kredit tersebut menyimpang dari tujuan sebelumnya.

II. Kewajiban dari PT. Bank BNI'46 Cabang Undip Semarang :

1. Wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang administrasi keuangan usaha debitur.
2. Mengadakan hubungan dan koordinasi dengan debitur dalam pembinaan dan pengawasan usaha-usaha yang dibiayai melalui pemberian kredit.

B. I. Hak-hak Debitur PT. Bank BNI'46 Cabang Undip Semarang yaitu :

1. Berhak memperoleh sejumlah uang (kredit) sesuai dengan permohonan kredit yang diajukan dan disepakati bersama.
2. Berhak menggunakan dana yang diperoleh dari kredit tersebut sesuai dengan keperluannya.

III. Kewajiban nasabah PT. Bank BNI'46 Cabang Undip Semarang, yaitu:

1. Mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit.
2. Membayar bunga, denda-denda dan lain-lain ongkos apabila lalai membayar angsuran pokok, bunga, denda-denda dan lain-lain.
3. Memberikan keterangan yang dianggap perlu atau yang dikehendaki oleh bank dan memberi kesempatan kepada bank untuk mengadakan pemeriksaan atas segala pembukuan.
4. Mengirimkan satu turunan dari daftar-daftar neraca rugi/laba dari usahanya tiap tahun kepada PT. Bank BNI'46 Cabang Undip Semarang.

5. Menyerahkan surat-surat bukti pemilikan barang agunan kepada PT. Bank BNI'46 Cabang Undip Semarang.
6. Pengambil kredit tidak mengikatkan diri sebagai penanggung terhadap pihak ketiga serta tunduk sepenuhnya kepada petunjuk dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak bank selama perjanjian kredit masih berlaku.

Menurut Bapak Taufik, SE karyawan Bank BNI'46 Bagian Kredit bahwa perjanjian kredit yang ada di Bank BNI'46 sama seperti yang di kemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman yaitu perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Perjanjian kredit ini bersifat riil disimpulkan demikian karena setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Kredit bisa ditarik setelah nasabah debitur memenuhi syarat-syarat yang diberikankan oleh bank. Syarat-syarat tersebut seperti klausul yang menyatakan mengenai batas ijin tarik kredit.

Dari kondisi diatas maka jelas bahwa perjanjian kredit tidak bisa dipersamakan dengan perjanjian pinjam mengganti atau pinjam meminjam seperti yang terdapat dalam Pasal 1754 KUHPdata yang bersifat riil seperti definisi sebagai berikut :

Pinjam meminjam ialah perjanjian yang menentukan bahwa pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang menghabis karena pemakaian kepada pihak kedua, dengan syarat bahwa pihak kedua

akan mengembalikan kepada pihak pertama barang yang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama pula.

Apabila kita perinci lagi ciri-ciri antara perjanjian kredit dan perjanjian pinjam meminjam maka ada 3 ciri yaitu :

1. Bahwa perjanjian kredit adalah bersifat konsensual sedangkan perjanjian pinjam meminjam bersifat riil.
 2. Bahwa kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tidak tertentu oleh debitur, mengingat pada perjanjian kredit, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit. Dan apabila ada penyimpangan terhadap pemakaian kredit tersebut maka bank berhak mengakhiri perjanjian kredit itu secara sepihak. Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam tidak uang pinjaman tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan kemauan debitur dan dalam hal ini pihak kreditur tidak berhak untuk mengakhiri perjanjian tersebut.
 3. Bahwa kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahan bukuan.
- Jadi kredit tidak pernah diserahkan dalam kekuasaan mutlak kepada nasabah debitur melainkan kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikannya atau penggunaannya selalu dibawah pengawasan bank.

Sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana caranya debitur akan menggunakan uang pinjamannya itu.

Selanjutnya mengenai asas-asas khusus dari hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur dapat diperinci sebagai berikut :

a. Hubungan kepercayaan

Hal ini dapat dipahami bahwa kredit berasal dari kata *Credere* yang artinya kepercayaan. Sehingga bank hanya akan memberikan kredit kepada nasabah apabila bank percaya kepada debitur bahwa debitur mampu membayar kembali kredit tersebut. Jadi hubungan hukum dalam perjanjian kredit bukan hanya hubungan kontrak biasa tetapi juga ada hubungan kepercayaan.

b. Hubungan kerahasiaan

Menurut UU Perbankan 1998 khususnya Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 dan 47 bank wajib menjaga kerahasiaan keuangan nasabah kecuali untuk kepentingan perpajakan dan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 41 dan Pasal 42).

c. Hubungan kehati-hatian

Dalam hal bank memberikan kredit kepada nasabah debitur, maka bank harus mempunyai keyakinan bahwa nasabah debitur tersebut akan melunasi hutangnya. Hal ini penting karena apabila tidak demikian, maka resiko yang dihadapi oleh bank dapat berpengaruh

pada keadaan dari masyarakat yang disimpan di bank, sehingga jelas bahwa harus berhati-hati hal penyaluran dana tersebut kepada nasabah debitur.

A.2. Beberapa Permasalahan Hukum Perjanjian Kredit Bank

A.2.1. Klausula-Klausula Dalam Perjanjian Kredit Yang Memberatkan Nasabah Debitur.

Dalam masyarakat ada kesan bahwa dalam hubungan antara bank dan nasabah debitur, bank selalu berada dalam posisi yang lebih kuat. Pada waktu kredit akan diberikan, pada umumnya memang bank dalam posisi yang lebih kuat daripada calon nasabah debitur. Oleh karena itu Bank Negara Indonesia memuat perjanjian kredit berisi klausula-klausula sebagai berikut :

- a. Klausula-klausula tentang maksimum kredit, jangka waktu kredit, tujuan kredit, bentuk kredit dan batas ijin tarik.
- b. Klausula-klausula tentang bunga, commitment fee, dan denda kelebihan tarik
- c. Klausula-klausula representations and warranties, yaitu klausula yang berisi pernyataan nasabah debitur mengenai fakta-fakta yang menyangkut status hukum, keadaan keuangan, dan harta kekayaan nasabah debitur pada waktu kredit diberikan, yaitu yang menjadi asumsi bagi bank dalam mengambil keputusan untuk memberikan kredit.
- d. Klausula tentang conditions precedent, yaitu klausula tentang syarat-syarat tangguh yang harus dipengaruhi terlebih dahulu oleh nasabah

debitur sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan dana bagi kredit tersebut dan nasabah debitur berhak untuk pertama kalinya menggerakkan kredit tersebut.

- e. Klausula tentang agunan kredit dan asumsi barang agunan.
- f. Klausula tentang financial covenants, yaitu klausula yang berisi nasabah debitur untuk menyampaikan laporan keuangan kepada bank dan memelihara posisi keuangannya pada minimal taraf tertentu.
- g. Klausula tentang tindakan yang dapat diambil oleh bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan dan penyelesaian kredit.
- h. Klausula tentang events of default/Wanprestasi, yaitu klausula yang menentukan suatu peristiwa yang apabila terjadi memberikan hak bank untuk secara sepihak mengakhiri perjanjian kredit dan untuk seketika dan sekaligus menagih seluruh outstanding kredit.
- i. Klausula tentang arbitrase, yaitu klausula yang mengatur mengenai penyelesaian perbedaan pendapat/perselisihan diantara para pihak melalui suatu badan arbitrase.
- j. Tindakan bank dalam rangka pengawasan dan penyelamatan kredit.
- k. Pilihan domisili/forum/hukum apabila terjadi pertikaian di dalam menyelesaikan kredit antara bank dan nasabah penerima kredit.⁵⁶⁾

Menurut Bapak Andi, SE nasabah Bank BNI⁴⁶ bahwa kedudukan para pihak yang tidak seimbang itulah yang dimanfaatkan oleh pihak bank untuk membuat klausula-klausula yang memberatkan nasabah debitur, sebab hanya pihak bank

⁵⁶⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik, SE, tanggal 10 September 2003.

terlindungi oleh karenanya pihak nasabah debitur dibebani dengan sejumlah kewajiban dan merupakan hak-hak bank yang meski dipenuhinya.

Dengan kelemahan kedudukan nasabah debitur itulah pihak bank memanfaatkan dengan lebih banyak membuat klausula- klausula yang tidak wajar dan tidak adil.⁵⁷⁾

Adapun klausula-klausula yang ada di Bank BNI'46 yang tidak wajar sangat memberatkan nasabah debitur, yaitu :

1. Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apapun dan tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin tarif kredit.
2. Kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga jual dari barang agunan dalam hal dilakukan penjualan barang agunan karena kredit nasabah debitur macet.
3. Kewenangan bank untuk mengubah tingkat suku bunga kredit.
4. Kewajiban nasabah debitur untuk tunduh kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan kemudian oleh bank.
5. Keharusan nasabah debitur untuk tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan membayar rekening karena dari bank yang bersangkutan, namun tanpa sebelumnya nasabah debitur diberikan kesempatan untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan namun hubungan rekening koran tersebut.

⁵⁷⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Andi, SE nasabah Bank BNI'46, tanggal 11 September 2003

6. Kuasa nasabah debitur yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank untuk dapat melakukan sejalan tindakan yang dipandang perlu oleh bank.
7. Pembuktian kelalaian nasabah debitur secara sepihak oleh pihak bank semata.
8. Pencantuman klausula eksepsi yang membebaskan bank dari tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitur atas terjadinya kerugian yang diderita olehnya sebagai akibat tindakan bank.⁵⁸⁾

Adanya klausula-klausula yang demikian adalah upaya bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Bank tidak ingin mengalami kerugian yang disebabkan nasabah debitur tidak sanggup dan tidak mampu lagi untuk melunasi hutangnya. Perjanjian kredit bank yang memuat klausula-klausula yang demikian kurang menguntungkan perkembangan dunia perbankan itu sendiri, karena keadaan tersebut dapat saja dimanfaatkan oleh nasabah debitur yang nakal dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga dengan dasar penyalahgunaan keadaan ekonomis tersebut pengadilan dengan sendirinya akan memutuskan, membatalkan perjanjian kredit bank tersebut.

Walaupun pada saat penandatanganan perjanjian kredit bank, bank menjadi pihak yang lemah, karena ada kemungkinan suatu sebab pengembalian/ pelunasan kreditnya mengalami kemacetan.

⁵⁸⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Rizal, SH, nasabah Bank BNI'46, tanggal 10 September 2003

A.2.2 Beberapa Permasalahan Hukum Dari Perjanjian Kredit Yang Merugikan Kedudukan Bank

Dalam masyarakat ada kesan bahwa dalam hubungan antara bank dan nasabah debitur, bank selalu berada diposisi yang lebih kuat. Pada waktu kredit akan diberikan pada umumnya bank dalam posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan nasabah debitur. Hal tersebut karena pada saat pembuatan perjanjian itu, calon nasabah debitur sangat membutuhkan bantuan kredit itu dari bank. Umumnya calon nasabah debitur tidak akan banyak menuntut karena mereka khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh bank, hal ini menyangkut posisi tawar menawar bank menjadi sangat kuat.

Bila nasabah debitur mempunyai integritas yang baik untuk menyalahgunakan kredit atau untuk secara sportif bersedia membayar kembali kredit yang telah menjadi macet, maka memang bank perlu harus mencari penyelesaian melalui bantuan hukum, tetapi yang banyak terjadi bahwa dalam keadaan kredit menjadi macet, baik oleh karena telah disalagunakan oleh nasabah debitur maupun karena usaha debitur mengalami kemacetan, ternyata bank tidak dapat mengandalkan sarana contract enforcement yang disediakan itu sangat tidak memadai untuk dapat memberikan perlindungan kepada bank dalam rangka pengembalian kredit itu. Begitu tidak memadainya sarana contact enforcement yang disediakan oleh hukum untuk dapat melindungi bank, sehingga sering kali membuat bank tidak berdaya sama sekali.

Berkaitan dengan perjanjian kredit, dijumpai juga adanya permasalahan hukum yang bila dilihat dari kacamata kepentingan bank sangat merugikan bank.

Dibawah ini akan dibahas mengenai beberapa permasalahan penting yang pada dewasa ini dihadapi oleh bank dalam kaitannya dengan perjanjian kredit tersebut.

Permasalahan tersebut adalah :

- A. Tidak dicantumkannya klausula-klausula lingkungan hidup dapat membahayakan bank terhadap gugatan ganti kerugian dan tuntutan pidana karena pencemaran lingkungan.
- B. Grosse akta perjanjian kredit notariil bukan notariele schuldbrief expase 224 HIR. Ternyata Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa grosse akta perjanjian kredit dibuat oleh notaris bukan merupakan notariele schuldbrief. Oleh karena itu sekalipun grosse akta tersebut memuat titik eksekusi yang berbunyi : "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu putusan hakim. Oleh karena itu tidak dapat dieksekusikan seperti suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan yang pasti dan tetap.
- C. Pelunasan Kredit Oleh Nasabah Debitur Sebelum Jangka Waktu Dapat Merugikan Bank.

Nasabah debitur melakukan pelanggaran atas syarat-syarat kredit yang dapat diklasifikasikan sebagai event of default, maka bank sebelum berakhirnya jangka waktu kredit tidak berhak untuk menarik kembali kredit itu, sehingga selama jangka waktu itu bank tidak berhak melarang nasabah debitur untuk menggunakan kelonggaran tarik

kreditnya. Dilihat dari kepentingan nasabah debitur ini merupakan tujuan dari perlunya ditariknya jangka waktu kredit.

- D. Tidak Dicantumkannya Klausula Canditions Precedent (syarat- syarat tangguh) Melemahkan Kedudukan Bank.

Yang dimaksudkan dengan canditions prevendent pada suatu perjanjian kredit adalah peristiwa atau kejadian yang harus dipenuhi atau terjadi terlebih dahulu setelah perjanjian kredit ditandatangani sebelum nasabah debitur dapat menggunakan kreditnya. Dengan kata lain setelah perjanjian kredit ditandatangani, nasabah debitur belum seketika itu mempunyai hak untuk menggunakan kreditnya. Atau sebaliknya pula, setelah ditandatanganinya perjanjian itu oleh kedua belah pihak, bank belum berkesimpulan untuk menyediakan kredit bagi nasabah debitur sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik kredit tersebut tergantung kepada terlebih dahulu telah dipenuhinya hal-hal yang disebutkan di dalam klausula tentang Canditions Prevendent tersebut yang tercantum dalam Pasal 1253 jo 1263 KUH Perdata.

B. PEMBAHASAN

B.1. Keefektifan Perjanjian Kredit Bank Sebagai Upaya Pengamanan Kredit Yang Disalurkan Pihak Bank.

Dalam pemberian kredit sangat berhubungan erat dengan perjanjian kredit, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit merupakan salah satu bagian

yang sangat strategis dalam kehidupan Perbankan. Disamping itu perjanjian kredit juga dapat dikatakan sebagai media atau perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana.

Perjanjian kredit disini berperan sebagai pedoman dan alat stabilisator dari kelancaran serta kepastian bagi pihak perbankan dan debitur secara proporsional terutama untuk menunjang sikap pembangunan.

Perjanjian kredit tidak mempunyai bentuk tertentu, hanya yang sering kita temui dalam suatu perjanjian kredit hampir semuanya mencantumkan soal pemilihan domisili, kewajiban batas waktu melunasi dan sebagainya.

Posisi perjanjian kredit ini cukup strategis karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, alat pedoman mengenai batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pemberian kredit maupun penerima kredit serta memiliki akibat dan resiko yang harus diderita oleh masing-masing pihak. Meskipun demikian ada beberapa kelemahan dalam perjanjian kredit antara lain mengenai ketentuan rahasia bank, penanganan kredit macet dan sebagainya.

Perjanjian kredit yang akan ditandatangani biasanya sudah dipersiapkan terlebih dahulu isinya oleh bank, hal ini karena perjanjian tersebut diperuntukkan bagi semua pemohon kredit sehingga bentuk perjanjian sering disebut sebagai perjanjian standard.

Perjanjian standard ini juga diberlakukan di Bank Negara Indonesia⁴⁶ Cabang Undip Semarang yang terdiri dari :

- a) Judul dari perjanjian.
- b) Para Pihak
- c) Isi perjanjian
- d) Penutup.⁵⁹⁾

Menurut Bapak Boedi, SH, nasabah Bank BNI'46 dalam membuat Perjanjian kredit tersebut harus di perhatikan kecakapan dan kemampuan hukum dari pihak-pihak untuk melakukan perbuatan yang terdapat dalam perjanjian kredit. sedangkan mengenai isi dari perjanjian kredit meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a) Jumlah maksimum kredit.
- b) Jangka waktu dan pembayaran bunga.
- c) Sanksi/denda yang dikenakan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.
- d) Pembayaran biaya, ongkos, upah.
- e) Domisili.
- f) Jaminan.
- g) Dan lain-lain. ⁶⁰⁾

Mengenai cara penarikan dari kredit yang diperoleh dapat dikemukakan dengan cara sebagai berikut :

- Ada kredit yang bisa ditarik sekaligus sebagaimana telah disepakati antara kreditur dan debitur.

⁵⁹⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik, SE, Bagian perjanjian kredit, tanggal 12 September 2003

⁶⁰⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Boedi, SH, nasabah Bank BNI'46, tanggal 13 September 2003

- Ada kredit yang bisa ditarik menurut kebutuhan kurang dari plafon kredit yang telah disepakati (pemberian kredit secara rekening koran).
- Mengenai cara pelunasan bunga bisa diperjanjikan, pembayaran bunga secara bulanan, triwulan, semester atau setahun sekali. Pembayaran bunga ini bisa dilakukan secara terpisah dari pembayaran angsuran pokok dan bisa juga dilakukan bersama-sama dengan angsuran pokok/pembayaran pokok.

Untuk menjaga bahwa kredit yang diperoleh dari bank dipergunakan oleh debitur sesuai dengan permohonannya, serta untuk menjaga akan pelunasan kredit yang bersangkutan, maka bank sering memperjanjikan bahwa semua pengeluaran atau penerimaan debitur mengenai perdagangannya dan atau perusahaannya harus dilakukan melalui kreditur.

Kemudian mengenai jaminan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam pemberian kredit, karena dengan adanya jaminan ini diharapkan keamanan dari kredit yang diberikan akan terjamin. Disamping itu jika dikaitkan dengan perjanjian kredit, maka fungsi dari suatu jaminan adalah merupakan alat penopang dari perjanjian kredit. Sehingga fungsi lembaga jaminan itu menjadi sarana untuk kepastian bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan benar-benar terjamin. Namun demikian sifat dari pemberian jaminan ini adalah *accessoir* artinya melekat atau mengikuti perjanjian pokok yakni perjanjian kredit itu sendiri. Jadi apabila perjanjian kredit hapus atau berakhir maka hapus pula penyerahan jaminan.

Selanjutnya pengikatan jaminan yang dilakukan di Bank Negara Indonesia⁴⁶ mempergunakan pengikatan secara fiducia yaitu penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Lembaga jaminan fiducia yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan demi kebutuhan praktek dunia usaha, dimana debitur menyerahkan seluruh benda bergerak yang dijaminakan kreditur secara formal, dan oleh kreditur dititipkan kembali kepada debitur untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari, berdasarkan kepercayaan.

Semua obyek jaminan fiducia adalah benda bergerak yang berupa alat perkakas rumah tangga, mesin, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Tetapi dalam perkembangannya lebih lanjut benda tidak bergerak dapat juga digunakan sebagai jaminan fiducia sebagai jaminan pokok maupun tambahan terhadap suatu kredit. Namun hal ini menimbulkan masalah hukum mengingat jaminan fiducia biasanya hanya digunakan untuk benda-benda bergerak.

Oleh karena itu dalam jaminan fiducia benda jaminan berada ditangan debitur maka banyak kelemahan yang terjadi yaitu :

1. Tidak bersifat openbaar, sehingga masyarakat umum tidak mengetahuinya bila barang tersebut sudah berpindah pemiliknya (dalam arti milik bank).
2. Barang secara fisik ditangan debitur sehingga sulit diawasi oleh bank selaku pemilik barunya.

3. Karena secara fisik barang agunan dikuasai oleh debitur, sehingga debitur dapat saja menfidusiakan lagi barang tersebut beberapa kali kepada pihak lain.
4. Meskipun barang secara hukum berada di tangan kreditur (bank), namun menurut kenyataannya bank sulit mengambil dan menjual barang tersebut.

Kelemahan jaminan fiducia di atas menyebabkan kesulitan dalam hal bank akan melakukan eksekusi jaminan fiducia. Padahal jaminan dalam pemberian kredit merupakan salah satu bagian yang penting dalam rangka bank mengamankan kredit yang disalurkan.

Oleh karena itu Bank Negara Indonesia⁴⁶ cabang Undip Semarang melengkapinya dengan dokumen yang disebut sebagai Surat Kuasa untuk menjual yang merupakan jaminan tambahan.

Obyek yang dikuasakan kepada kreditur biasanya berupa tanah serta bangunan yang terletak di atasnya. Dengan adanya surat kuasa untuk menjual ini debitur memberi kuasa secara khusus untuk menjual barang-barang jaminannya kepada kreditur apabila dalam waktu yang ditentukan debitur tidak dapat mengembalikan utangnya.

Disamping itu diperjanjikan pula bahwa pemberian kuasa dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pokoknya dan pemberian kuasa tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhirnya tercantum dalam Pasal 1813 KUHPdata. Wawancara dengan Bapak Taufik, SE, Bagian Kredit menyatakan bahwa Surat kuasa untuk menjual ini merupakan bentuk pembayaran

yang dapat dilaksanakan oleh debitur tidak melunasi hutangnya tanpa surat peringatan dari juru sita.⁶¹⁾

Dengan surat kuasa menjual baik yang dilakukan dibawah tangan atau dengan akta notaris, pihak kreditur setelah mengetahui debitur ingkar janji dapat langsung menyerahkan pelaksanaan penjualan barang-barang tersebut kepada kantor lelang negara tanpa prosedur di Pengadilan Negeri. Cara ini dipandang cukup menguntungkan kreditur karena prosesnya sederhana dan tidak sulit dieksekusi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taufik, SE Bagian Kredit dan Gatot Supramono berpendapat bahwa pemberian jasa sebagai jaminan utang merupakan pembuatan yang dikategorikan sebagai penyelundupan hukum karena pemberian kuasa tidak dipergunakan sebagaimana maksud dan tujuannya. Lembaga ini bukan lembaga jaminan utang yang sifatnya *accessoir*. Tanpa ada perjanjian yang mendahuluinya, maka perjanjian pemberian kuasa dapat dilakukan oleh para pihak.⁶²⁾

Melihat latar belakang yang demikian maka terdapat barang jaminan yang berupa benda bergerak tetap digunakan lembaga jaminan fiducia dan terhadap benda tetap dengan berlakunya Dengan berlakunya Undang-undang hak tanggungan 1996 maka telah diambil alih oleh hak tanggungan sepanjang mengenai tanah.

Pengamanan kredit yang diberikan di Bank Negara Indonesia⁴⁶ Cabang Semarang meskipun sudah ada jaminan sering kali masih mengalami kesulitan

⁶¹⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik, SE, Bagian Kredit, tanggal 14 September 2003.

⁶²⁾ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, 1997. Hal : 104

maka di dalam perjanjian kredit perlu ditambah adanya klausula yang menyangkut mengenai asuransi. Klausula ini bertujuan untuk pengalihan resiko yang mungkin terjadi baik atas barang jaminan maupun kreditnya sendiri. Dan memuat mengenai maskapai asuransi yang ditunjuk, premi asuransinya. Keharusan polis asuransi disimpan bank dan sebagainya.

B.2. Upaya-upaya yang dilakukan Bank Negara Indonesia 46 Dalam Rangka Melakukan Pengamanan Kredit.

Sebagaimana diketahui bahwa pokok bank adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan utama pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit. Dengan demikian bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan.

Kredit yang diberikan oleh bank perlu diamankan. Tanpa adanya pengamanan, bank sulit mengelakkan resiko yang datang sebagai akibat dari tidak berprestasinya nasabah. Pangamanan kredit merupakan suatu mata rantai kegiatan bank dan suatu aspek yang penting dalam manajemen kredit, karena proses pengamanan berjalan terus menerus dan mengkaitkan kegiatan yang satu dengan yang lain.

Oleh karena itu dalam upaya pengamanan kredit, sebelum permohonan kredit dikabulkan, Bank Negara Indonesia'46 Cabang Semarang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keadaan intern Bank.

2. Keadaan calon Nasabah.⁶³⁾

Keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafon kredit. plafon kredit yang dimaksudkan disini adalah batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Jadi terhadap permohonan kredit yang masuk, bank harus memperhatikan sektor yang dimintakan kreditnya masih terbuka atau tidak. Apabila masih terbuka maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan kreditnya. Keadaan tersebut dipergunakan sebagai tindakan kehati-hatian yang mutlak harus dilakukan oleh pihak bank agar kredit yang diberikan kepada pihak debitur dapat dikembalikan sepenuhnya.

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam permohonan kredit adalah menyangkut :

- Pribadi peminjam
- Harta bendanya
- Usahanya
- Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjamannya dan hal-hal lainnya yang turut mempengaruhi.

Syarat-syarat di atas dalam kategori pembahasan analisa kredit lebih dikenal dengan istilah 5 C of credit, yaitu karakter, capacity, capital, collateral dan condition of economy.

⁶³⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik, SE, Bagian Kredit, tanggal 12 September 2003

1. Karakter (watak)

Aspek karakter ini yang dianalisa meliputi :

- Riwayat singkat usaha pemohon kredit.
- Bagaimana selama berhubungan dengan bank,
- Bagaimana aktifitas rekening tabungan dengan bank,
- Sudah berapa kali mendapat fasilitas kredit di BPR, BKK,
- Bagaimana pengadilan kredit yang lalu dalam artian lancar/kurang lancar/diragukan atau macet.
- Informasi bank lain.
- Referensi
- Kesimpulan

Watak peminjam sangat mempengaruhi pengembalian kredit. Seringkali terjadi tunggakan atau kemacetan kredit bukan disebabkan kegagalan usaha tetapi dari watak orang tersebut. Banyak ditemui oleh pihak perbankan, seorang debitur yang baru menanjak dibidang usahanya lupa diri, kemudian membelanjakan uangnya melebihi kemampuannya, akhirnya perusahaannya mengalami kegagalan. Apabila sudah terjadi demikian, biasanya debitur tersebut akan memberikan janjinya kepada perbankan yang managih, dan biasanya janji tersebut hanyalah janji kosong belaka. Debitur seperti tersebut di atas harus dihindari untuk pemberian kredit berikutnya. Karena biasanya watak sangat sulit berubah. Beberapa watak debitur/calon debitur yang dapat dijadikan pedoman yang positif bagi bank dalam menilai permohonan kredit adalah :

- Belajar dari pengusaha lain
- Selalu menepati janji
- Mendahulukan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan pribadi
- Mau mengalah untuk menang
- Tidak membuat rencana yang mengada-ada
- Berorientasi kemasa depan
- Keterbukaan untuk penyesuaian
- Krestif, korest, tanggap, hemat, senang ilmu.

2. Capacity (kemampuan/kapasitas)

Aspek kapasitas ini yang dianalisa meliputi :

- Menganalisa mengenai bagaimana keadaan fisik pemohon kredit.
- Bagaimana pengembangan dalam usaha
- Ketepatan dalam pengembalian

Seorang debitur/calon debitur yang mengajukan permohonan pinjaman, perlu diketahui sejauh mana kemampuannya dalam mengelola usahanya/usaha yang dipimpinnya.

Beberapa patokan dalam menilai kemampuan debitur/calon debitur yaitu :

- Kemampuan melunasi pinjam disertai bunga tepat pada waktunya.
- Penguasaa pasar (marketing).

- Efisiensi dan efektifitas usahanya/perusahaannya.
- Sistem organisasi (manajemen) usahanya.
- Penguasaan teknis produksi.
- Kemampuan dalam menghasilkan laba perusahaan.

Mengetahui kemampuan debitur/calon debitur dalam mengelola usahanya dapat diartikan menilai managerial capacity perusahaan secara terpadu.

Artinya Bank harus dapat menilai :

- Berapa besar kemampuan assetnya dalam menghasilkan laba yakni dengan membandingkan net income terhadap total asset perusahaan.
- Berapa besar return on average earning assets (aktiva yang menghasilkan) dengan jalan membandingkan net income terhadap average total loan.
- Efisiensi perusahaan dengan jalan membandingkan operating expenses terhadap average assets.
- Dan lain-lain.

3. Capital (modal)

Mengenai modal perusahaan yang sudah ada, dalam hal ini pihak Bank Negara Indonesia'46 Cabang Undip Semarang tidak melakukan analisa permodalan debitur.

4. Collateral (Agunan/jaminan)

Aspek jaminan atau agunan ini yang dianalisa meliputi :

- Bentuk barang yang dijamin yaitu berupa sertifikat/SK pegawai Negeri, Kartu Pegawai/SPK/BPKB.
- Kondisi jaminan.
- Jaminan dibuat oleh (surat kuasa)

Penganalisaan terhadap jaminan/agunan merupakan salah satu persyaratan untuk memutuskan pengajuan suatu pinjaman. Dengan agunan dapat dihindari kerugian bank apabila si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Tetapi tidak hanya agunan saja harus diperhitungkan dalam memutuskan pinjaman, artinya apabila debitur/calon debitur mempunyai agunan yang cukup, tidak berarti bahwa kelayakan usahanya tidak perlu dianalisa. Jaminan dapat berbentuk barang dan dapat pula berbentuk “Kepercayaan”.

Jaminan berupa barang dapat dikelompokkan menjadi :

- Jaminan pokok (adalah agunan dari barang yang dibiayai oleh pinjaman).
- Jaminan tambahan (adalah agunan yang tidak dibiayai oleh pinjaman).

5. Condition of Economy (kondisi ekonomi)

Mengenai aspek kondisi ekonomi pemohon kredit yang dianalisa meliputi :

- Jenis usaha
- Bentuk usaha/group usaha lainnya.

- Besar permohonan yang diajukan

Selain hal-hal di atas dalam menganalisa kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit, tidak saja kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah itu berada. Seperti misalnya keadaan perdagangan serta persaingan di lingkungan usaha calon nasabah, kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya. Dengan memperhatikan dan mengetahui hal-hal tersebut diharapkan bantuan kredit yang diberikan bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

Penganalisaan di atas ditambah dengan penganalisaan mengenai perijinan yang harus dipenuhi oleh pihak calon nasabah yaitu meliputi : ⁶⁴⁾

- Bentuk perijinan (TDP/NPWP/SIUP/TDR)
- Tujuan penggunaan kredit
- Surat keabsahan lainnya
- Keputusan kredit yang disetujui

Menurut Ibu Rani nasabah Bank Negara Indonesia⁴⁶ apabila kita akan memperoleh kredit dari Bank, maka Bank tersebut haruslah memperhatikan keyakinan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kredit dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan yang diperjanjikan. yang antara lain sebagai berikut : : ⁶⁵⁾

1. Penilaian watak debitur terutama didasarkan kepada hubungan bank dengan debitur yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari

⁶⁴⁾ Hasil Wawancara dengan Bapak Taufik tanggal 15 September 2003

⁶⁵⁾ Hasil Wawancara dengan Ibu Rani, nasabah BNI⁴⁶, tanggal 16 September 2003

pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank dapat menyimpulkan bahwa debitur tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan bank dikemudian hari.

2. Untuk penilaian kemampuan, bank terutama harus meneliti tentang keahlian debitur dalam bidang usahanya dan atau manajemen debitur, sehingga bank merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dengan kredit tersebut dikelola oleh orang yang tepat.
3. Untuk penilaian terhadap modal, bank terutama harus melakukan analisa terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha debitur yang bersangkutan.
4. Untuk penilaian terhadap prospek usaha debitur, bank terutama harus melakukan analisa mengenai keadaan pasar di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun dimasa yang akan datang, sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil prospek bank yang bersangkutan.
5. Seharusnya dalam melakukan penilaian terhadap aguna¹⁾ bank harus menilai barang, prospek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, dan barang lain, surat berharga atau garansi resiko, yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai, sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi

kecreditnya agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali kredit bank yang bersangkutan.

Proses penganalisaan ini dilakukan oleh bagian kredit Bank Negara Indonesia⁴⁶ yang kemudian di croscek yang menganalisa Pimpinan Bank Negara Indonesia dengan menghasilkan penganalisaan yang akurat dan hal ini dilakukan dalam upaya pengamanan kredit.⁶⁶⁾

Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan selesai. Masih ada lagi persyaratan yang harus di penuhi oleh debitur agar permohonannya krditnya di kabulkan. Persyaratan tersebut di tuangkan dalam suatu dokumen kelengkapan perjanjian kredit yang sering di sebut Document of accessoir.

Menurut Pimpinan Bank Negara Indonesia dokumen yang menyertai perjanjian kredit terdiri dari :

1. Surat permohonan kredit.
2. Surat Kuasa pemotongan gaji.
3. Surat kuasa menjual.
4. Daftar perincian penghasilan.

Mengenai surat permohonan kredit ini berisi hal-hal yang berkaitan dengan :

- a. Keterangan pribadi pemohon
- b. Keterangan pinjaman :
 - Jenis usaha yang dibiayai dengan pinjaman
 - Tujuan penggunaan pinjaman.
- c. Keterangan usaha

⁶⁶⁾ Hasil Wawancara dengan Ibu Lisa, SE, Bagian Kredit, tanggal 17 September 2003

- Apakah usaha ini merupakan sumber penghasilan utama, sebagian besar sumber penghasilan kedua atau sebagian kecil sumber penghasilan.
- Perputaran usaha terdiri dari harian, mingguan, bulanan, atau penghasilan musiman.
- Perkiraan perputaran usaha terdiri dari penjualan biaya laba.
- Tenaga kerja yang digunakan untuk usaha ini.
- Jumlah gaji yang dibayarkan perbulan.

Surat permohonan kredit ini ditandatangani oleh pemohonan kredit dan diketahui dalam arti disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan/ Juru bayar Instansi/Dinas.⁶⁷⁾

Kemudian untuk surat pemotongan gaji dan daftar rincian penghasilan diperuntukkan bagi calon nasabah yang Pegawai Negeri dimana pembuatan perincian penghasilan dan kekuasaan pemotongan gaji ini diberikan kepada juru bayar/bendahara dari instansi yang bersangkutan.

Dokumen di atas secara yuridis disebut dokumen tambahan dan berfungsi sebagai dokumen jaminan terhadap dilunasinya hutang yaitu sebagai bagian dalam upaya pengamanan kredit.

⁶⁷⁾ Hasil Wawancara dengan Ibu nani, nasabah BNI'46, tanggal 17 September 2003.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam per bab maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Posisi perjanjian kredit itu cukup strategis karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian pengelolaan maupun penatalaksanaan kredit itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, alat pedoman mengenai batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pemberi kredit maupun penerima kredit serta memiliki akibat dan resiko yang harus diderita oleh masing-masing pihak.

Perjanjian kredit yang akan ditandatangani biasanya sudah dipersiapkan terlebih dahulu isinya oleh bank, hal ini karena perjanjian tersebut diperuntukkan bagi semua permohonan kredit sehingga bentuk perjanjian yang demikian tadi sering disebutkan sebagai perjanjian standard.

2. Upaya Bank Negara Indonesia'46 Cabang Undip Semarang dalam usaha pengamanan kredit ada beberapa tindakan :

Karena proses pengamanan dimulai pada saat permohonan kredit akan diajukan oleh nasabah debitur dengan melihat :

1. Keadaan intern bank

Keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafon kredit yaitu mengenai batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya atau bank memperhatikan sekitar kredit masih terbuka atau tidak.

2. Keadaan calon nasabah

Analisa terhadap calon nasabah Bank Negara Indonesia'46 melalui analisa 5 C yaitu karakter, capacity, capital, collateral dan condition of economy.

B. SARAN

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa antara pemberi kredit dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa yang abstrak, sehingga di dalam kredit terkandung resiko yang dimaksud resiko di dalam kredit adalah keadaan tidak membayar kembali atas kredit yang diterimanya. Oleh karena itu untuk menghindari kredit macet Bank harus memperbaiki :

- Analisa kredit yang tidak tepat
- Pengaruh dari pemilik Bank dalam keputusan kredit
- Kualitas manajemen bank
- Lembaga jaminan yang ideal, yaitu hak tanggungan.
- Syarat-syarat syahnya perjanjian kredit.
- Standard contract serta permasalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Hay Marhainis, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Badrulzaman Darus Mariam, *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya*, Alumni Jakarta, 1981.
- Badrulzaman Darus Mariam, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni Bandung, 1983.
- Kansil Dan Christine Kansil, *Model Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, Pradya Paramita, 1997.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1989.
- Mahmoedin, *Aspek Kredit Bank*, Gunung Agung, Jakarta. 1995.
- Nasution AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*. Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Purwadi Ari, *Perjanjian Baku Sebagai Upaya Mengamankan Kredit Bank, Hukum Dan Pembangunan Nomor XXV Pebruari, Tahun 1995*.
- Prodjodikoro Widyono, *Pokok-pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Patrik Purwahid, *Hukum Perdata (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)* FH, Undip, Semarang, 1996.
- Raharjo Pratman, *Uang Dan Bank*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1985.
- Sinungan Mudarsyah, *Seluk-Beluk Kredit Dan Teknik Pengelolaan*, Yograt, Jakarta, 1979.
- Soemitro Hanitijo Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Graha Indonesia, Jakarta, 1990.
- Syahdeini Remi Sutan, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Tirtodiningrat, *Ikhtisar Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, PT.Pembangunan, Jakarta, 1966.
- Tje Aman Edy Putra Mgs, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Tjipto, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
- Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Widyadharma Ridwan Ignatius, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Widyanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1997.

Wardoyo Gatot CH, *Sekitar Klausula-klausula Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, 1985.

Wiryono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1983.

MAKALAH

Segi-Segi Keperdataan Masalah Kredit Macet, Oleh Purwahid Patrik Pada Disnatalis Ke-9 Universitas Muhammadiyah Magelang, 1993.

UNDANG-UNDANG

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

UNDANG-UNDANG PERBANKAN NO. 10 TAHUN 1998.